



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 102

TAHUN : 2001

SERI : D NO. 94

GUBERNUR BALI,

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

**RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PROPINSI BALI
TAHUN 2002 - 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
 - b. bahwa tantangan pembangunan yang menonjol adalah menurunnya sosial ekonomi masyarakat, sedangkan tuntutan Pembangunan Daerah Bali adalah terwujudnya manusia dan masyarakat Bali

sebagai kesatuan tatanan sosial yang utuh, ber-keadilan, damai, sehat, sejahteralahirbatin, humanis ekologis dan bertumpu pada konsep Tri Hita Karana yang dijiwai oleh Agama Hindu dan didukung oleh sumber dayamanusiayang andal untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

- c. bahwa tantangan dan tuntutan pembangunan tersebut perlu ditanggapi dan diantisipasi oleh segenap aparat dan masyarakat Bali, dengan upaya penyelenggaraan pembangunan terpadu, yang direncanakan secara cermat, dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- d. bahwa penyelenggaraan pembangunan terpadu tersebut huruf c, perlu direncanakan berdasarkan prioritas dan pemilihan sasaran yang mempunyai nilai strategis yang memberikan dampak positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. bahwa untuk pencapaian maksud tersebut huruf d, diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada seluruh aparat Pemerintah Propinsi Bali;
- f. bahwa agar sistem akuntabilitas dimaksud huruf e, dapat berjalan dengan baik, perlu adanya Rencana Strategik (Renstra), Pemerintah Propinsi Bali Tahun 2002-2005;
- g. bahwa Rencana Strategik (Renstra) dimaksud huruf f, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).

Dengan Persetujuan DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG
RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PROPINSI
BALI TAHUN 2002-2005

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan

Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Rencana Strategik yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program, dan kegiatan Daerah.

BAB II SISTIMATIKA

Pasal 2

Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Daerah Tahun 2002-2005 terdiri dari :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KONDISIUMUM DAERAH BALI
- BAB III VISI DAN MISI
- BAB IV FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
- BAB V PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI CARAMENCAPAI TUJUAN
- BAB VII PENUTUP

Pasal 3

Isi beserta uraian perincian dimaksud pasal 2, diuraikan dalam naskah Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Daerah Tahun 2002-2005 terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, disusun program dan kegiatan setiap tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Disahkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Nopember 2001

GUBERNURBALI,

ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 20 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTUWIJANAYA, SH
PEMBINAUTAMA
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 102
SERI D NOMOR 94.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PROPINSI BALI
TAHUN 2002 - 2005

I. UMUM

Menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Propinsi Bali untuk menetapkan Rencana Strategik (Renstra) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Bali. Renstra ini adalah dalam upaya pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Rencana Strategik (Renstra) ini ditetapkan dengan memperhitungkan faktor lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Disamping itu juga memperhatikan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Propinsi Bali. Rencana Strategik (Renstra) berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TANGGAL 8 NOPEMBER 2001
NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PROPINSI BALI
TAHUN 2002 - 2005

NASKAH RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PROPINSI BALI
TAHUN 2002 - 2005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemikiran

Perkembangan sistem pemerintahan mengalami perubahan sejalan dengan paradigma yang berkembang dimasyarakat. Perubahan tersebut mengharuskan pemerintah mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat baik dipusat maupun di daerah. Agar pelaksanaan akuntabilitas dapat berjalan dengan baik, perlu adanya Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Propinsi Bali. Sebagai tolok ukur penilaian pertanggung jawaban kinerja Pemerintah dalam kurun waktu tertentu maka disusun Renstra Pemerintah Propinsi Bali 2002-2005.

Sejalan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, makaprinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah.
5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan ke-mandirian Daerah Otonom karena dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi.
6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa, yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada Lembaga yang menugaskan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Propinsi dan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dilakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi yang terus berkembang tidak

tertutup kemungkinan dilakukan dengan tahapan secara konsisten dan berkelanjutan.

1.2. Pengertian

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah disebutkan bahwa perlu disusun dokumen perencanaan Daerah sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah dalam bentuk Rencana Strategik (Renstra). Rencana Strategik yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan daerah.

Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggung-jawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3. RuangLingkup

Ruang lingkup Renstra Pemerintah Propinsi-Propinsi Bali 2002-2005 mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal Pemerintah, yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari aspek politik dan hukum; sosial, budaya, agama, ekonomi, pertahanan keamanan, tata ruang dan birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, serta menampung dari hasil dialog interaktif yang telah dilaksanakan bersama parapelakupembangunan (*stakeholders*), ditetapkan Visi, dan Misi serta Strategi pencapaian Visi dalam kurun waktu 2002-2005.

Visi dan Misi Propinsi Bali tersebut, merupakan amanat rakyat Bali untuk dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Berdasarkan visi, misi serta strategi tersebut maka ditetapkan program prioritas yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2002-2005, dengan kegiatan sesuai dengan kewenangan Propinsi, namun tetap diperlukan adanya dukungan Pemerintah dan masyarakat.

1.4. Kedudukan

Rencana Strategik Pemerintah Propinsi Bali Tahun 2002-2005 setelah mendapat pengkajian yang mendalam dari berbagai pelaku pembangunan (*stake holder*), dan persetujuan DPRD Propinsi Bali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali, maka kedudukan Rencana Strategik Pemerintah Propinsi Bali Tahun 2002-2005 secara resmi telah memperoleh kekuatan hukum, sehingga mengikat seluruh komponen masyarakat Bali dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

1.5. Maksud dan Tujuan

Renstra Pemerintah Propinsi Bali sebagai pedoman umum dan arahan kebijaksanaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terpadu antar wilayah/daerah atau lintas daerah, dan lintas sektoral. Adapun tujuannya adalah mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berlandaskan pada falsafah *Tri Hita* Karana, mandiri, maju dan sejahtera.

1.6. Landasan Penyusunan

Dasar penyusunan Renstra Pemerintah Propinsi Bali dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut:

- (1) Landasan Idiil, yaitu Pancasila;
- (2) Landasan Konstitusional, yaitu Undang-undang Dasar 1945;
- (3) Landasan Operasional antara lain : (a) Ketetapan MPR No. *TV/MPR/1999* tentang GBHN, (b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, (c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (e) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (f) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, (g) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (h) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, (i) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Bali Tahun 2000-2005.

1.7. Sistematika

BAB I Pendahuluan, yang berisi latar belakang pemikiran, pengertian, ruang lingkup, kedudukan. Maksud dan tujuan, landasan penyusunan serta sistematika pembahasan.

BAB II Kondisi Umum Daerah Bali, terbagi dalam dua bagian *Pertama, kondisi umum*, menguraikan tentang kondisi wilayah dan kondisi sosial ekonomi. *Kedua, Faktor lingkungan internal dan eksternal yang berisi analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.*

BAB III Visi dan Misi, Visi Bali dan penjabarannya dalam rumusan Misi untuk kurun waktu 2002-2005. Dijelaskan pada bab ini latar belakang pemikiran dan uraian singkat proses penyusunan Visi dan Misi Bali. Untuk merefleksikan visi menjadi sesuatu yang konkrit dan dapat diukur, disusun indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian secara makro.

BAB IV Faktor Penentu Keberhasilan, berisi mengenai unsur-unsur dari pemerintah dan masyarakat yang dapat menjadi pendorong untuk menentukan keberhasilan strategi Bali dalam mencapai visi dan misinya.

BAB V Penetapan Tujuan dan Sasaran. Penetapan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, serta merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sedangkan penetapan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu target yang akan dicapai atau dihasilkan dan menggambarkan esensi yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk

mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik dan dapat dicapai.

BAB VI Cara pencapaian tujuan dan sasaran. Berisi mengenai kebijaksanaan program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB VII Penutup.

BAB II KONDISIUMUM DAERAH BALI

2.1. Kondisi Umum

Luas wilayah Pulau Bali adalah 563.286 Ha (5.632,86 Km²) atau 0,29 % dari luas wilayah Indonesia. Jumlah penduduk padatahun 2000 sebanyak 3.146.999 jiwa dengan kepadatan 558 jiwa/Km² dan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata mencapai 1,26% per tahun dalam periodetahun 1990-2000.

Secara administratif Propinsi Bali dibagi menjadi 8 Kabupaten dan 1 Kota, 53 Kecamatan, 678 Desa/Kelurahan, 1.387 DesaAdat dan 3.945 BanjarAdat.

Berdasarkan pola penggunaan lahan tahun 2000 terdiri atas 5,95 % tanah pemukiman, 15,83 % tanah sawah, 23,20 % kawasan hutan, 43,85 % perkebunan dan tegalan, 7,58 % kritis, 0,64 % danau/waduk dan 2,95 % lain-lain. Pola penggunaan lahan ini cenderung mengalami perubahan setiap tahunnya karena adanya alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian menjadi pemukiman atau prasarana lainnya sebagai akibat pesatnya pembangunan Daerah Bali. Disisi lain Daerah Bali memiliki sumber daya alam terbatas yang tidak dapat diolah untuk mendatangkan devisa bagi daerah dan negara. Luas kawasan hutan adalah 130.686,01 Ha atau 23,20 % dari luas Pulau Bali yang belum memenuhi persyaratan ideal dan sebagian besar merupakan hutan lindung yang harus dilestarikan agar dapat memberikan fungsi optimal bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Disyukuri bahwa Daerah Bali memiliki nilai-nilai Budaya yang unik menjadikan daya tarik bagi wisatawan nusantara dan mancanegara dan sekaligus menjadi landasan pembangunan Daerah Bali. Disamping itu masyarakat Bali juga memiliki ketrampilan dibidang seni yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, daerah dan negara.

Perkembangan kondisi sosial ekonomi Propinsi Bali dapat dilihat dari indikator-indikator ekonomi makro sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Bali tahun 1996 sebelum krisis ekonomi mencapai 8,16% kemudian menurun pada saat mulai krisis (Tahun 1997) menjadi 5,18% dan sampai krisis memuncak tahun 1998 laju pertumbuhan perekonomian Bali mencapai minus 4,04 %. Dampak krisis ini sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan perekonomian Daerah Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Sedangkan upaya pemulihan yang dilaksanakan berjalan lambat sehingga belum bisa keluar dari krisis ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Bali dalam 2 tahun terakhir menunjukkan arah yang lebih optimis terhadap perekonomian Bali ke depan. Hal ini terlihat pada tahun 2000 laju pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 3,05 % atau meningkat dibanding tahun 1999 yang hanya mencapai 0,67 %. Peningkatan ini erat kaitannya dengan beberapa sektor ekonomi yang cukup dominan pengaruhnya seperti pertumbuhan industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran.

2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian dalam perkembangannya lima tahun terakhir, masih didominasi oleh sektor-sektor prioritas yaitu pertanian dalam arti luas, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Peranan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB meningkat dari 19,33 % tahun 1997 menjadi 23,31 % pada tahun 1998, kemudian menurun dari 22,10 % tahun 1999 menjadi 20,61 % pada tahun 2000. Disisi lain peranan sektor non pertanian, menurun dari 80,67 % tahun 1997 menjadi 76,69 % tahun 1998, kemudian meningkat dari 77,90 % tahun 1999 menjadi 79,39 % tahun 2000.

3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita penduduk Bali atau PDRB perkapita meningkat rata-rata 17,24 % pertahun dari Rp. 3,293 juta tahun 1997 menjadi Rp. 5,306 juta tahun 2000.

4. Inflasi

Meningkatnya harga-harga digambarkan dengan besarnya tingkat inflasi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Laju inflasi pada tahun 1996 sebesar 3,14 % kemudian meningkat drastis setelah krisis ekonomi yaitu pada tahun 1997 sebesar 9,75 % dan tahun 1998 sebesar 75,11 %. Pada tahun 1999 laju inflasi menurun menjadi 4,39 % dan tahun 2000 sebesar 8,98%.

5. Pembiayaan Pembangunan

Pembiayaan pembangunan selama lima tahun terakhir (1996/1997-2000) mencapai Rp. 10,925 triliun yang bersumber dari sektor Pemerintah sebesar Rp. 3,957 triliun (36,22 %) dan swasta termasuk swadaya masyarakat sebesar Rp. 6,968 triliun (63,78 %).

Dari indikator-indikator ekonomi makro tersebut, kondisi sosial ekonomi Daerah Bali sejak tahun 1999 sudah mencapai tahap pemulihan dan tahun 2000 dalam proses tahap pemantapan sesuai dengan tahapan kebijaksanaan penanganan krisis ekonomi yaitu tahap penyelamatan (*Rescue*), pemulihan (*Recovery*) dan tahap pemantapan (*Stabilization*) untuk pembangunan kembali.

2.2 Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

A. Faktor Lingkungan Internal.

KEKUATAN

1. Kebudayaan Daerah Yang Dijiwai Agama Hindu.

Kebudayaan Daerah Bali adalah satu sosok kebudayaan yang hidup, tumbuh dan berkembang yang tersusun atas komponen fisik, struktur dan inti kebudayaan yaitu sistem nilai kebudayaan yang dihidupkan oleh jiwa kebudayaan yaitu Agama Hindu. Hal ini berarti Agama Hindu menjiwai kebudayaan Bali dan Kebudayaan Bali mewarnai pelaksanaan Agama Hindu. Jiwa kebudayaan ini, bukan saja memantapkan arti bobot kualitatif, namun juga menyebabkan makna spiritualitas, yang berfungsi bagi keberdayaan budaya dan sekaligus bagi ketahanan budaya

Bali. Kekuatan keberdayaan kebudayaan Bali dapat diformulasi-kan dari struktur dan pengalaman sejarahnya yaitu : (1) dalam keterbukaan dan komunikasinya dengan unsur-unsur asing, kebudayaan Bali memperlihatkan diri sebagai sistem yang penuh vitalitas, selektif dan adaptif; (2) kebudayaan Bali merupakan satu sistem yang unik dengan identitas yang jelas; (3) Kebudayaan Bali merupakan perwujudan kebudayaan ekspresif, memiliki landasan etika dan estetika yang kuat; (4) Kebudayaan Bali adalah satu sistem yang dinamik (5) Kebudayaan Bali memiliki akar dan daya dukung lembaga-lembaga tradisional yang kokoh antara lain Desa Pekraman sebanyak 1.387 Desa Pekraman, dan 3.945 Banjar Adat; subak sawah dan Abian 2.267 subak dan sekaa-sekaa (6) Memiliki ciri kebersamaan atau kolektivitas dan demokratis (*paras-paros salulung sebayantaka*) (7) Kebudayaan Bali memperlihatkan kekayaan variasi serta kaya akan konsepsi-konsepsi yang dipakai sebagai landasan pembangunan daerah Propinsi Bali antara lain konsepsi *Tri Hita Karana dan Tri Mandala*.

2. Kontribusi Sektor Pertanian dalam Struktur Perekonomian Bali

Sektor pertanian dengan bertumpu pada kekuatan agrobisnis selama tahun 2000. Dalam empat tahun terakhir produksi padi meningkat rata-rata sebesar 1,51 % pertahun dari 791.196 ton gabah kering giling tahun 1997 menjadi 826.838 ton gabah kering giling pada tahun 2000. Begitu pula produksi palawija seperti kacang hijau meningkat rata-rata 1,06 % pertahun. Sementara itu komoditas sayuran seperti bawang daun meningkat 10,89 %, sawi naik 7,15 %, kacang panjang 1,46 % dan tomat 11,64 %. Buah-buahan seperti semangka/melon naik 52,14 %, mangga naik 14,77 %, rambutan naik 14,45 % dan salak naik 1,06 %.

Luas areal perkebunan secara keseluruhan mencapai 166.535 ha. Pada tahun 1999. produksi kelapa sebanyak 71.594,63 ton dan tahun 2000 meningkat menjadi 75.581,51 ton. Demikian pula halnya dengan produksi kopi dan cengkeh

yang mengalami peningkatan yaitu produksi kopi dari 14.035 ton tahun 1999 menjadi 24.010 ton tahun 2000 dan produksi cengkeh dari 1.165 ton menjadi 10.975 ton. Demikian juga jambu mete juga mengalami peningkatan dari 2.926 ton menjadi 5.088 ton.

Populasi sapi potong dan babi mengalami peningkatan yaitu masing-masing dari 526.013 ekor tahun 1999 menjadi 529.074 ekor pada tahun 2000 dan populasi babi dari 968.011 ekor menjadi 1.560.435 ekor tahun 2000.

Produksi perikanan laut dan darat tahun 2000 mencapai 145.549,9 ton yang terdiri atas produksi perikanan laut (penangkapan dan budidaya) sebesar 142.429,90 ton dan perikanan darat 3.125,0 ton. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 1999 sebesar 145.402,1 ton mengalami peningkatan sebesar 1,01 %. Produksi hasil hutan non kayu seperti jasa yang tidak bisa terukur secara langsung seperti produksi air, oksigen dan jasa wisata alam sangat berperan bagi pertumbuhan ekonomi Bali secara umum maupun pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas.

3. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai.

Prasarana dan sarana yang telah dibangun secara bertahap dan berlanjut dalam rangka menunjang pembangunan Bali telah tersedia di seluruh Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi setempat. Prasarana dan sarana yang tersedia antara lain prasarana jalan, air bersih, listrik, telpon, pelabuhan, serta fasilitas lainnya. Prasarana jalan yang tersedia di Bali sepanjang 6.626,25 Km, yang terdiri dari jalan nasional dengan panjang 405,93 Km kondisinya baik 70,05 %, sedang 27,48 % jalan provinsi sepanjang 846,89 Km, kondisi baik 67,22 % sedang 27,63 % dan jalan kabupaten 5.373,43 Km dengan kondisi baik 67,69 % dari permukaan jalan yang beraspal. Tingkat pelayanan air bersih perkotaan tahun 2000 mencapai 84,37 % dan pelayanan air bersih pedesaan sebesar 58,91 %. Jumlah desa yang telah mendapat listrik mencapai 100 %, dan banjar yang telah mendapat listrik sudah mencapai 96,60 %.

4. Berkembangnya kepariwisataan.

Melalui pembangunan kepariwisataan (dengan identitas pariwisata budaya) masyarakat dan kebudayaan Bali makin terbuka dan makin dinamik dalam konteks kehidupan global. Berfungsinya kebudayaan secara operasional, mampu menjadi daya tarik utama bagi peningkatan kepariwisataan. Hal ini memberi petunjuk betapa pentingnya peranan kebudayaan bagi pengembangan kepariwisataan sehingga pembangunan kepariwisataan di Bali akan menjadi relevan di dasarkan kepada "Pariwisata Budaya" sebagaimana diatur dalam Perda No. 3 tahun 1991. Hal ini didukung oleh Daerah Bali yang memiliki potensi lokal yang sangat khas seperti budaya, sistem tata nilai kehidupan yang sangat unik, pemandangan alam yang sangat eksotis, keramahan penduduk, sistem sosial dan tata cara kehidupan yang diatur oleh adat setempat, arsitektur, kesenian dan tata kehidupan spiritual. Sarana dan prasarana kepariwisataan yang ada juga sangat mendukung pengembangan kepariwisataan Bali, seperti akses jalan yang memadai, jarak antar obyek wisata tidak terlalu jauh dan mudah dijangkau, fasilitas kepariwisataan yang cukup lengkap serta potensi lainnya yang saling bergantung dan saling mempengaruhi sehingga pembangunan kepariwisataan Bali adalah pembangunan kepariwisataan yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali terus mengalami peningkatan rata-rata 12,27 % pertahun yaitu dari 1.140.988 orang tahun 1996 menjadi 1.230.316 orang tahun 1997. Walaupun tahun 1998 mengalami penurunan menjadi 1.187.153 orang (karena krisis ekonomi) namun tahun 1999 meningkat menjadi 1.355.799 orang dan tahun 2000 sebanyak 1.412.839 orang. Wisatawan yang kedatangannya berasal dari Asia Pasifik dan Eropa yaitu dari Jepang, Australia, Taiwan dan Inggris mendominasi sekitar 87,36 %. Kuatnya sektor pariwisata Bali, secara umum juga tercermin dari rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara yaitu tahun 1998 selama 9 hari dan pada tahun 2000 selama 11 hari atau meningkat 10,55 % pertahun dengan tingkat hunian kamar hotel berbintang mencapai

69,6 % pada tahun 2000. Pengeluaran wisatawan mancanegara di Daerah Bali tahun 1998 mencapai sebesar US \$ 89,27 dan pada tahun 2000 sebesar US \$ 77,35.

5. Berkembangnya Industri Kecil Kerajinan.

Sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang cukup baik adalah terciptanya struktur perekonomian daerah ke arah yang lebih berimbang. Hal ini dapat dilihat dari peranan sektor non pertanian dalam pembentukan PDRB yaitu tahun 1999 sebesar 77,90 % menjadi 79,39 % pada tahun 2000. Beberapa indikator dari pesatnya perkembangan industri adalah perkembangan sentra industri yaitu sampai dengan tahun 2000 sebanyak 1.011 sentra dengan jumlah unit usaha 75.470 buah sebagai indikator berkembangnya ekonomi kerakyatan. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pada tahun adalah sebanyak 233.264 orang mengalami peningkatan sebesar 1,08 % pertahun dari tahun 1998/1999. Jumlah investasi disektor ini pada tahun 2000 mencapai Rp. 233.189 juta dengan nilai produksi sebesar Rp. 2.047,898 juta. Nilai ekspor industri mencapai US \$ 348,315 juta tahun 2000 atau meningkat 1,01% bila dibandingkan dengan tahun 1999. Peranan atau kontribusi nilai ekspor hasil-hasil industri tahun 2000 mencapai 85,58 % dari total ekspor daerah Bali sebesar US \$ 406,985 juta. Hal ini berarti peranan industri dalam perekonomian Bali sangat besar pengaruhnya.

6. Adanya Stabilitas Keamanan.

Secara umum situasi kondisi keamanan dan ketertiban di Propinsi Bali masih cukup aman, tertib dan terkendali berkat kesiapsiagaan aparat keamanan beserta masyarakat (Desa Pekraman) untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Daerah Bali. Ketentraman dan ketertiban merupakan suasana aman, damai, tertib, penuh toleransi yang terjadi di dalam masyarakat merupakan prasyarat di dalam proses pembangunan sehingga kehidupan masyarakat berjalan dengan baik.

7. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 pada intinya dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah, penguatan masyarakat madani dan kehidupan yang demokratis, dapat mengelola secara bertanggung jawab dan adil berbagai sumber daya yang tersedia untuk kesejahteraan masyarakat. Secara kultural, otonomi daerah tersebut adalah untuk mempertahankan, mengapresiasi dan mempromosikan diversitas, identitas dan keunggulan cultural. Sedangkan secara administrasi, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya. Pemerintah dan masyarakat Bali sangat menyadari bahwa daya dukung Bali dalam kerangka pembangunan "Bali sebagai satu kesatuan" adanya saling ketergantungan dan saling mendukung antar daerah Kabupaten dan Kota, karena sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Dikaitkan dengan otonomi daerah tersebut, untuk memperdayakan masyarakat Bali diperlukan kerjasama antar daerah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan, pembangunan berbudaya dan pembangunan berwawasan lingkungan dalam kerangka "Bali seutuhnya". Pembangunan yang melibatkan unsur-unsur lingkungan alam, manusia, dan budaya; yang kalau digabungkan dengan azas berkelanjutan dan azas good governance dalam kegiatannya melalui pendekatan wilayah akan dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

8. Kuantitas SDM yang memadai

Dalam pembangunan kedepan menuntut peran serta seluruh masyarakat yang lebih meningkat pada semua bidang dan sektor pembangunan, mengingat peran serta masyarakat bukan saja merupakan indikator bagi mengakarnya pembangunan dalam masyarakat.

Pembangunan sumber daya manusia mempunyai sasaran untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan semua rakyat yang semakin merata dan adil, terselenggaranya pendidikan dan

pelayanan kesehatan yang semakin bermutu dan merata sehingga mewujudkan manusia yang berbudi pekerti luhur, tangguh, sehat, cerdas, berdisiplin, kreatif, produktif dan profesional. Keadaan penduduk Bali berdasarkan hasil Sensus penduduk tahun 2000, dari jumlah penduduk 3.146.999 jiwa, 74,44 % atau 2.342.585 jiwa adalah penduduk usia kerja. Presentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja mencapai 81,62 % dan yang bekerja sebesar 97,33 % dengan tingkat pengangguran sebesar 2,67 % atau mencari pekerjaan sebesar 51.112 jiwa, Penyerapan tenaga kerja sebagian besar ada di sektor pertanian sebesar 35,20 %, perdagangan hotel dan restoran 22,29 %, industri 15,15 %, jasa 13,78 % dan sisanya sebanyak 13,58 % berada di luar sektor tersebut. Untuk Pembangunan sektor pendidikan, pada tahun 1999 angka partisipasi kasar untuk Sekolah Dasar (SD) mencapai 115,88 %, SLTP 85 % dan SMU mencapai 61,23 % dan pada tahun 2000 angka partisipasi kasar untuk SD mencapai 114,19 %, SLTP 85,77 % dan SMU 60,96 % serta jumlah mahasiswa yang tamat sebanyak 7.427 orang.

9. Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan pembangunan sangat memerlukan adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan implementasi dari kebijaksanaan paradigma pembangunan yang partisipatif yaitu dari-oleh-untuk rakyat. Partisipasi masyarakat dalam membiayai pembangunan di Propinsi Bali cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi peranan swasta dan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan selama lima tahun terakhir (1996/1997-2000) sebesar 63,78 % dari total pembiayaan pembangunan sebesar Rp. 10,925 triliunan 36,22 % dari sektor pemerintah.

10. Adanya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya.

Daerah Bali sebagai sebuah ekosistem pulau yang terletak pada daerah transisi garis Wallacea berada diantara Zone Asia Eropa dengan Zone Australia mempunyai keunggulan dari segi geografis, yang berdampak pada adanya potensi alam, flora dan

fauna yang sangat menentukan pertumbuhan sektor lain terutama perkembangan kepariwisataan.

11. Terbukanya Kesempatan Kerja dan Berusaha

Kuatnya peranan pariwisata sebagai leading sektor di dalam menggerakkan perekonomian Bali, makin terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. Jumlah kesempatan kerja terus meningkat dari 1,703 juta orang tahun 1999 menjadi 1,714 juta orang tahun 2000 dengan tingkat pengangguran dalam periode yang sama sebesar 3,56 % dan 3,16 %.

KELEMAHAN.

1. Adanya Kesenjangan Potensi Sumber Daya antar Kabupaten/ Kota.

Sebagai akibat dari perbedaan potensi daerah yang dimiliki dan kemampuan sumber daya untuk mengelola pembangunan daerah yang berbeda, maka terjadi perkembangan pembangunan yang kurang seimbang antara Kabupaten/Kota atau antar perdesaan dan perkotaan.

Kesenjangan ini antara lain dapat dilihat dari :

- Perbedaan yang sangat tajam kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing Kabupaten dan Kota, sehingga pembangunannya selalu tertinggal bagi kabupaten yang PAD nya kecil seperti Kabupaten Tabanan, Klungkung, Bangli, Karangasem dan Buleleng dibawah Rp. 10 milyar dibandingkan Kabupaten Badung yang mencapai Rp. 153,7 milyar, Denpasar Rp. 38,1 milyar dan Gianyar Rp. 25,1 milyar tahun 2000
- PDRB perkapita, tahun 2000 dibawah Rp. 5,00 juta adalah Kabupaten Jembrana (Rp. 4,846 juta), Tabanan (Rp. 3,933 juta), Bangli (Rp. 3,774 juta), Karangasem (Rp. 3,113 juta) dan Kabupaten Buleleng (Rp. 3,636 juta) dan rata-rata Bali sebesar Rp. 5,306 juta.

- Penduduk miskin yaitu Pra KS dan KS I, sebagian besar ada di Kabupaten Buleleng (28.334 KK), Karangasem 24.078 KK dan Kabupaten Jembrana (11.957 KK).

Adanya kesenjangan ini, berimplikasi pada masing-masing Kabupaten/Kota berusaha memanfaatkan potensi dan sumber dayayang terbatas berlomba-lombameningkatkan pembangunan dengan maksud meningkatkan PAD nya. Hal ini akan menyebabkan kecendrungan pelanggaran rencana tata ruang, mengganggu keseimbangan lingkungan dan kelestarian budaya Bali.

2. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai.

Sumber daya manusia masih rentan dari tingkat pendidikan angkatan kerja. Dalam pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, beretos kerja, produktif, maju, efisien, profesional, dan mempunyai kemampuan kewirausahaan sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja. Disamping itu diperlukan sumber daya manusia yang mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan iptek. Kualitas SDM dapat dilihat dari Indeks Pembangunan manusia yang diukur melalui kondisi penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketerampilan serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 62,2 pada tahun 1999, artinya pembangunan manusia Bali tercapai sebesar 62,2 % dari angka seharusnya (ideal). Dilihat dari indikator pendidikan dari hasil susenas 2000, prosentase penduduk yang mampu bacatulis huruf latin sebesar 85,40 % atau meningkat dari 84,10 % tahun 1999. Prosentase terbesar dari angka tamat sekolah penduduk usia 10 tahun keatas, terdapat pada jenjang tamat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 29,30 %, tidak/belum tamat SD 30,69 %, SLTP 13,48 %, SMU/K 21,49 % dan tamat Diploma/Akademi/ Universitas 5,04 %. Dilihat dari indikator kesehatan antara lain angka kematian bayi perseribu kelahiran hidup mencapai 33,50, angka kematian kasar perseribu penduduk mencapai 10,60 dan umur harapan hidup mencapai 69,50 tahun.

3. Masih adanya Penduduk Miskin.

Bertambahnya penduduk miskin dari 125.600 orang (4,29%) padatahun 1996 menjadi 418.650 orang padatahun 1998 karena adanya krisis ekonomi dan pada tahun 1999 menurun menjadi 332.023 orang atau sebesar 10,99 % dari penduduk Bali. Demikian pula dengan menurunnya status Keluarga Sejahtera, terdapat Keluarga Pra KS dan KSI sebanyak 110.086 KK yang sebagian besar (75 %) karena alasan ekonomi dan sisanya 25 % karena alasan non ekonomi antara lain kondisi pendidikan dan kesehatan yang buruk, lingkungan perumahan yang tidak sehat, adanya bencana alam dan wilayahnya yang kritis.

4. Adanya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Telah terjadi kerusakan lingkungan seperti pantai yang mengalami abrasi, kerusakan sungai dan sumber air seperti pada air, danau dan waduk. Perubahan pemanfaatan lahan yang diakibatkan cepatnya pembangunan prasarana sarana yang menyebabkan berkurangnya resapan air, serta pembangunan tidak sesuai dengan peruntukan. Pada beberapa lokasi seperti daerah-daerah perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata ada kecendrungan kualitas lingkungan makin menurun dengan meningkatnya zat-zat pencemar yang dibuang kelingkungan. Kondisi ini makin meluas karena makin pesatnya pembangunan fisik yang cenderung memanfaatkan kawasan-kawasan resapan air dan kawasan lindung. Berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai dampak dari pembangunan, (baik sebagai akibat ulah manusia maupun oleh proses alami itu sendiri) adalah makin meningkatnya erosi pantai sepanjang 70,05 Km dari panjang pantai 430,00 Km, dan adanya lahan kritis seluas 42.690 Ha. Jumlah sungai di daerah Bali yang mempunyai muara sebanyak 162 buah, sekitar 38 buah yang kondisinya rusak dan daya tampung rendah (demensi alur lebih kecil dan daya tampung pada saat musim hujan).

5. Kepadatan penduduk yang tidak merata.

Propinsi Bali mempunyai luas wilayah 5.632,86 Km² atau

0,29 % dari luas negeri RI dengan jumlah penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah 3.146.999 jiwa dengan kepadatan 558 jiwa/Km². Kepadatan penduduk Kabupaten/Kota yang lebih besar dari rata-rata Bali adalah Kota Denpasar dengan kepadatan 4.294 jiwa/Km², Gianyar 1.068 jiwa/km² dan Kabupaten Badung 826 jiwa/km² dan Kabupaten lainnya dibawah 615 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Bali antara tahun 1990-2000 mencapai 1,26 % pertahun dan paling tinggi di Kota Denpasar sebesar 3,20 %, Badung sebesar 2,33 %, dan Gianyar sebesar 1,56 % sedangkan Kabupaten lainnya laju pertumbuhan penduduk dibawah 0,94 %.

6. Belum adanya persepsi yang sama antar pelaku pembangunan terhadap konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pelaksanaan otonomi daerah.

Belum adanya persamaan persepsi terhadap konsepsi pembangunan yang berwawasan lingkungan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pada akhirnya akan memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Dengan banyaknya permasalahan lingkungan. Demikian pula halnya dengan persepsi tentang pelaksanaan otonomi Kabupaten/Kota yang sering menimbulkan interpretasi berbeda-beda dan menunjukkan gejalayang sangat desentralistik yang seolah-olah tidak ada koordinasi dan kesepakatan antar Kabupaten/Kota dan Propinsi. Hal ini disebabkan karena dengan perbedaan kondisi dan potensi setiap kabupaten/kota, dimana untuk membiayai daerahnya baik belanja rutin maupun pembangunan diperlukan danayang cukup besar, sedangkan disisi lain kemampuan sumber daya manusia dan PAD nyaterlalu tajam perbedaannya sehingga pelaksanaan otonomi di Kabupaten/Kota belum berjalan sesuai yang diharapkan. Bahkan implementasi dari Undang-undang 22 tahun 1999 yang mengatur tentang Otonomi Daerah telah menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan menunjukkan gejala kearah yang sangat desentralistik, dimana pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab itu, seolah-olah tidak ada lagi hubungan antara daerah Kabupaten/

Kota dan daerah Propinsi dan antar daerah terkotak-kotak, sehingga disinyalir akan membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

7. Belum optimal kesadaran dan penegakan hukum.

Pembangunan hukum yang kurang mendapat perhatian selama ini telah mengakibatkan ketidakmampuan sektor hukum berperan sebagai panglima dalam pembangunan, sehingga muncul situasi tidak tegaknya supremasi hukum dan pelanggaran HAM. Tidak terwujudnya supremasi hukum disebabkan oleh lemahnya penegakan dan pemerataan hukum sehingga tidak dirasakan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Disamping itu, kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati aturan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan mudahnya terjadi tindakan kekerasan seperti perampokan, pembunuhan, perusakan rumah, narkoba, perjudian dan lain-lain.

8. Kurangnya pemahaman terhadap akuntabilitas kinerja a.

Kurangnya pemahaman ini tercermin dari pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dan penyelenggaraan urusan publik belum optimal dalam pemberian pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Hal ini didukung oleh kualitas aparatur masih rendah.

9. Lemahnya sistem informasi Manajemen (SIM).

Dengan perbedaan tingkat perekonomian setiap kabupaten/kota secara tidak langsung mempengaruhi informasi yang akan diperoleh sehingga akan mengakibatkan terlambatnya melaksanakan pembangunan.

**B. FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL
PELUANG.**

1. Berlakunya UU. 22/1999 dan UU 25/1999

Dampak positif dari reformasi sekarang adalah adanya pergeseran paradigma dan system pemerintahan yang bercorak

sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralistik dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Melalui pelaksanaan kedua Undang-undang tersebut, diharapkan akan membawa perubahan kepada kehidupan pemerintah daerah yang dapat mewujudkan "*Good Governance* " dalam upaya mendekatkan pelayanan pemerintah dengan rakyatnya dan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan di Propinsi Bali.

2. Adanya kepercayaan dunia internasional terhadap kondisi keamanan Bali.

Kesan dari pihak luar terhadap keramahan dan sifat kegotongroyongan maupun kerukunan masyarakat Bali cukup tinggi. Hal ini akan mempengaruhi secara umum situasi kondisi keamanan dan ketertiban di Propinsi Bali yang cukup aman, tertib dan terkendali disamping itu juga berkat kesiapsiagaan aparat keamanan beserta masyarakat (desa adat) untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Propinsi Bali.

3. Letak Geografis Bali yang strategis.

Kalau dilihat dari social ekonomi, letak Pulau Bali sangat strategis karena berperan sebagai penghubung lalu lintas darat, laut dan udara antara pulau-pulau di Nusa Tenggara dan Jawa serta antara Asia dan Australia. Hal ini akan menjadikan peluang untuk meningkatkan pembangunan Bali secara keseluruhan.

4. Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama

Daerah Bali sebagai salah satu tujuan wisata di Indonesia, makin potensial untuk berkembang. Hal ini makin dikenal oleh masyarakat dunia dan makin meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali. Disamping itu daerah Bali juga memiliki potensi lokal yang sangat khas seperti kebudayaan termasuk sistem sosial dan tata cara kehidupan yang diatur dalam desa pekraman, obyek wisata, dayatarik wisata, kesenian,

keanekaragaman hayati dan keindahan alam akan menjadi potensi untuk pengembangan kepariwisataan yang berwawasan budaya dan berkelanjutan secara utuh. Pembangunan Daerah Bali yang bertumpu pada sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil, peranan pariwisata sebagai andalan perekonomian Bali diharapkan mampu menggalakkan kegiatan ekonomi dan sektor-sektor lainnya sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan negara serta meningkatkan penerimaan devisa.

5. Adanya Globalisasi.

Globalisasi ekonomi dan perdagangan yang didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi menghadirkan berbagai peluang secara ekonomi, sosial dan kebudayaan. Tataan ekonomi yang merupakan suatu sistem ekonomi pasar yang bersifat global dan kompetitif, saat ini akan terbuka peluang seluas-luasnya bagi produk-produk Bali yang berorientasi ekspor untuk memasuki pasar internasional, pengembangan dan pemanfaatan informasi dan teknologi tepat guna.

6. Kerjasama antar daerah dan antar negara.

Citra yang baik memberikan peluang bagi Daerah Bali untuk melakukan kerjasama baik regional maupun internasional, sehingga dapat memanfaatkan potensi pihak luar. Kerjasama antar daerah dan antar negara sangat dibutuhkan dalam pemantapan otonomi daerah.

7. Adanya kontribusi dari bagian keuntungan BUMN.

Banyaknya BUMN yang ada di Daerah Bali akan menjadi peluang dengan kontribusinya untuk meningkatkan PAD sehingga dapat membantu meningkatkan pembangunan daerah Bali dan memantapkan otonomi daerah.

8. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kreatifitas diri.

Menghadapi perkembangan ekonomi pada era globalisasi,

terbukakesempatan untuk meningkatkan kreatifitas dan inovatif masyarakat yang didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi sehingga menghasilkan nilai tambah produk-produk ekspor yang unik, menarik sesuai dengan kebudayaan Bali. Disamping itu adanya likuidasi beberapa kanwil/kandep di daerah Bali yang sekaligus merupakan pelimpahan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman akan memberikan peluang terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

9. Terbukanya ke sempatan untuk melaksanakan koordinasi.

Daerah Bali yang wilayahnya kecil, dimana sarana dan prasarana transportasi mudah, sehingga hal ini akan mempermudah untuk melaksanakan koordinasi, baik lintas kabupaten/kota maupun lintas sektor.

10. Pengembangan potensi pemungutan PAD.

Pengembangan pemungutan PAD melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan Lain-lain pendapatan cukup potensial melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, mengingat potensi sumber daya yang dimiliki masih cukup potensial untuk dikembangkan.

11. Pemanfaatan teknologi yang berkembang.

Perkembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) termasuk telekomunikasi, media dan informatika (Telematika) pada era globalisasi membuka peluang dan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi dan pelayanan. Teknologi informasi merupakan faktor pendukung bagi pembangunan daerah Bali yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek hukum yang mampu meningkatkan daya saing dalam

menghadapi tantangan globalisasi. Disamping itu, ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peranan sangat penting dalam kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terutama menggerakkan industri yang berbasis IPTEK.

12. Masih tingginya minat investor.

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali memberikan jaminan secara ruang kepada para investor, disamping iklim usaha yang cukup sehat dan Daerah Bali sebagai tujuan wisata utama di Indonesia. Pengembangan penanaman modal oleh masyarakat dan dunia usaha akan memberi peluang memperluas kesempatan dan lapangan kerja serta kemitraan yang saling menunjang dan saling menguntungkan guna mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan mandiri.

TANTANGAN

1. Belum adanya konsistensi diantara Produk-produk hukum nasional yang ada.

Adanya aturan-aturan dari pemerintah pusat yang tidak konsisten sehingga menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintah. Seringkali pula tidak adanya kesatuan bahasa antara instansi ditingkat pusat dalam mengatur substansi yang sama. Sementara itu masih banyak kewenangan-kewenangan yang telah diserahkan kepada propinsi. Kabupaten/Kota, namun masih belum ada peraturan yang jelas. Disamping itu, substansi dari undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan 25 tahun 1999 belum sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah Bali. Daerah Bali sebagai satu kesatuan tatanan sosial dan budaya dengan diberlakukan UU. 22 Tahun 1999 menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dan menunjukkan gejala ke arah yang sangat desentralistik sehingga antar Kabupaten/Kota, dan daerah Propinsi seolah-olah terkotak-kotak dan tidak ada hubungan yang hirarkis. Disamping itu daerah Bali luasnya relatif kecil tidak mempunyai sumber daya alam, sedangkan UU. 25 tahun 1999 substansinya mengarah pada keberadaan sumber daya alam yang dapat dikelola oleh setiap kabupaten/kota.

2. Adanya pengaruh sosial politik ekonomi nasional dan global.

Posisi Daerah Bali yang strategis dan sebagai daerah tujuan utama pariwisata disamping dapat mengundang keuntungan, juga mendatangkan kerawanan dari masuknya berbagai kepentingan dan menjadi tantangan proses demokrasi, pelestarian lingkungan dan pelestarian kebudayaan Bali.

3. Pesatnya arus informasi global.

Globalisasi ekonomi dan perdagangan yang didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi, mengakibatkan terjadinya pergeseran-pergeseran orientasi dalam masyarakat yang semakin terbuka dan meluas secara horisontal ke dalam komunikasi dan jaringan global. Arus informasi global yang sangat pesat akan mempengaruhi perekonomian daerah dimana aturan perdagangan internasional menuntut kualifikasi produk yang tinggi dan mempunyai nilai tambah sehingga merupakan tantangan bagi pengusaha kecil, menengah menghadapi persaingan dipasar global dan nasional. Tantangan terhadap kebudayaan Bali dapat berasal dari dalam yang terkait dengan transformasi agraris-industri dan transformasi budaya yang bersifat negatif seperti komersialisasi, individualisme, materialisme yang membawake dangkalan dan merapuhkan dasar-dasar moral dan landasan batiniah. Sedangkan dari luar termasuk teknologi informasi yang terkait dengan tekanan globalisasi dan nasionalisme yang memperlakukan kebudayaan sebagai obyek yang dalam berbagai fenomena harus direkayasa.

4. Stabilitas nasional yang belum kondusif

Masih tidak menentunya keadaan politik dan keamanan secara nasional mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara di Daerah Bali.

5. Timbulnya konflik horinzontal dan vertikal.

Berlakunya otonomi daerah yang luas di Kabupaten/Kota berimplikasi pada egoisme antar daerah sehingga menimbulkan

persaingan tidak sehat. Hal ini dipicu oleh kuatnya keinginan masing-masing Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk membiayai pembangunannya. Disamping itu adanya konflik horizontal dan vertikal diluar daerah Bali akan berimbas pula dampaknya di Daerah Bali.

BAB III VISI DAN MISI

Bali merupakan ekologi pulau kecil, terbatas dalam sumber daya alam, kecil dalam jumlah penduduk, namun besar dalam potensi kebudayaannya. Pola Dasar merumuskan, bahwa landasan pembangunan daerah Propinsi Bali adalah kebudayaan Bali yang dijiwai agama Hindu dan *Tri Hita Karana*, yang merupakan tiga penyebab kebahagiaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan menyeimbangkan tujuan ekonomi, pelestarian kebudayaan dan lingkungan hidup.

Kebudayaan Bali sangat fungsional dalam kehidupan masyarakat Bali masa dulu, kini dan masa depan sebagai pembentuk jati diri, potensi dasar pembangunan, citra kehormatan dan kemartabatan, serta sebagai media ekspresi dan perekat masyarakat Bali. Dalam skala nasional, kebudayaan Bali berperan bagi pengayaan dan diversifikasi kebudayaan nasional dalam format *Bhineka Tunggal Ika*. Dalam skala global, kebudayaan Bali ikut mendukung pelaksanaan diplomasi kebudayaan serta menyuguhkan satu alternatif keunikan, keunggulan dalam entitas warisan budaya dunia.

Terkait dengan dinamika lokal, nasional dan global yang terakselerasi melalui perkembangan pendidikan, teknologi, informasi, persaingan sumber daya manusia dan perdagangan bebas, maka pembangunan daerah Bali dihadapkan kepada berbagai peluang dan tantangan. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan dengan berbagai hasil positif maupun kekurangannya, namun dinamika dan kompleksitas serta tantangan abad XXI mendorong adanya penanganan pembangunan lebih holistik, lintas sektor dan partisipatif sesuai dengan amanat reformasi dan paradigma baru agar mampu mengkondisikan ketahanan dan keberdayaan sumberdaya alam, kebudayaan dan agama secara berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih perlu memperhatikan perubahan fungsi, tatanan, penurunan daya dukung, mutu lingkungan dan sistem informasi lingkungan (SIL). Pengawasan oleh institusi pemerintah dan kontrol masyarakat serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih rendah serta dampak penurunan kualitas lingkungan belum sepenuhnya diperhitungkan dalam pembangunan.

Pembangunan kependudukan masih dihadapkan dengan makin meningkatnya migrasi penduduk, perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan (urbanisasi), sistem pemantauan dan registrasi penduduk migran belum memadai serta proporsi penduduk lanjut usia (lansia) semakin meningkat.

Pengelolaan Tata Ruang, dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan: pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah ada sehingga menimbulkan tekanan pada lingkungan hidup yang akhirnya mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem; perkembangan permukiman baik dipertanian maupun di pedesaan cenderung merusak tatanan ruang arsitektur tradisional yang memiliki nilai-nilai sebagai aset budaya; dan pengembangan zone wilayah belum mantap.

Dibidang pendidikan permasalahan yang dihadapi adalah : kualitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah karena tingkat ketrampilan dan pendidikan yang belum memadai; dan kualitas pendidikan formal maupun non formal masih rendah dan jumlah sekolah kejuruan dan ketrampilan masih kurang.

Permasalahan di bidang Budaya, Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa : makna ajaran agama (khususnya Hindu) belum didalami dan dipahami dengan baik sebagai landasan etik, moral dan spiritual dalam menumbuhkembangkan kehidupan masyarakat sebagai mana yang diharapkan; dan pemahaman nilai-nilai budaya daerah di dalam kehidupan masyarakat cenderung menurun.

Pembangunan daerah Propinsi Bali selama ini telah menghasilkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan, antara lain berkembangnya perekonomian dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, hal itu dapat dicapai berkat semakin meningkatnya peran serta masyarakat secara menyeluruh yang didukung oleh stabilitas daerah di berbagai bidang yang sehat dan dinamis.

Berkembangnya perekonomian daerah Propinsi Bali ditunjukkan oleh terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja disatu pihak, sedangkan dilain pihak pertumbuhan penduduk terus dapat ditekan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, struktur perekonomian daerah makin berimbang dengan besarnya peran sektor non pertanian dalam perekonomian.

3.1. Visi

Perencanaan pembangunan dimasa yang akan datang hendaknya disesuaikan dengan paradigma yang sedang terjadi dan berkembang dimasyarakat, baik pada tatanan masyarakat global, nasional, daerah dan masyarakat seluruh Bali.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Propinsi Bali perlu diperhatikan keseimbangan dan kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Pendekatan pembangunan juga perlu mengalami perubahan yakni dari pendekatan top down ke pendekatan bottom up atau dari-oleh-untuk rakyat dan dari pendekatan terukur ke dalam pendekatan bermakna. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut maka aspek yang dominan dalam pembangunan daerah Propinsi Bali adalah aspek supremasi hukum, ekonomi kerakyatan, lingkungan hidup, politik yang demokratis, pemerintahan yang baik (good governance) dan kebudayaan daerah, tanpa mengurangi pentingnya aspek-aspek pembangunan lainnya. Landasan pembangunan daerah Propinsi Bali adalah kebudayaan Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana*.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam lima tahun kedepan ini pemerintah dan masyarakat Bali memiliki Visi:

** Terwujudnya manusia dan masyarakat Bali sebagai satu kesatuan tatanan sosial yang utuh, berkeadilan damai, sehat, sejahtera lahir bathin, humanis, ekologis dan bertumpu pada Konsep Tri Hita Karana yang dijiwai oleh agama Hindu dan didukung oleh sumber daya manusia yang handal untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.**

3.2. Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dan memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi pemerintah Propinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan supremasi dan penegakan hukum serta menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia (HAM).
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin.
- c. Memberdayakan ekonomi rakyat khususnya usaha kecil, menengah dan koperasi dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, pariwisata dan industri agar menjadi tangguh dan mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- d. Melaksanakan otonomi daerah dengan mengedepankan jati diri dan kemandirian masyarakat Bali dengan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kemampuan ditingkat lokal, nasional dan global.
- e. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketentraman dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial dan budaya yang dinamis dan kondusif.
- f. Memberdayakan kebudayaan daerah, lembaga-lembaga tradisional dan lembaga-lembaga adat daerah Bali dalam konteks kebudayaan nasional dan global.
- g. Mewujudkan Bali sebagai kesatuan yang utuh melalui pemerataan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- h. Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, dan transparan serta meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3.3 Indikator Makro

Indikator Makro yang dimaksudkan di sini sebagai cerminan misi dalam wujud yang lebih konkrit dan dapat diukur. Indikator tersebut yang terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial selanjutnya merupakan acuan dalam rangka mewujudkan Visi Daerah Bali secara makro.

Indikator makro tersebut didasarkan pada perkembangan yang terjadi dan yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang baik yang menyangkut perkembangan dalam skala regional, nasional maupun skala global.

Dalam jangka pendek, pembangunan Daerah Bali diarahkan untuk memantapkan kondisi pemulihan. Atas dasar kondisi tersebut, selanjutnya dalam jangka menengah lebih diarahkan pada pemantapan kondisi sosial ekonomi dalam rangka memperkuat landasan pembangunan Daerah Bali yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pencapaian indikator makro tersebut sangat tergantung kemauan dan partisipasi masyarakat. Untuk itu diperlukan keterpaduan meningkatkan kinerja bersama antara Pemerintah, terutama Pemerintah Propinsi Bali dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, dan masyarakat. Adapun indikator makro yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Penduduk

Jumlah penduduk Bali hasil sensus 2000 sebanyak 3.146.999 orang dengan kepadatan penduduk sebanyak 558 orang per km². Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kepadatan penduduk diatas rata-rata adalah Kota Denpasar : 4294 orang/km² dengan luas wilayah paling kecil (2,20 %), Kabupaten Gianyar : 1068 orang/km² dengan luas wilayah : 6,53 % dan Kabupaten Badung : 826 orang/km² dengan luas wilayah 7,43 %. Pertumbuhan penduduk selama kurun waktu antara sensus tahun 1990-2000 mencapai 1,26 % rata-rata pertahun. Ketiga Kabupaten/Kota tersebut pertumbuhan penduduknyajugatertinggi diatas pertumbuhan rata-rata terutama Kota Denpasar sebesar 3,20 % pertahun, Badung 2,33 % dan Gianyar 1,56 %.

Untuk kurun waktu 2001-2005 pertumbuhan penduduk diharapkan dapat ditekan dengan pertumbuhan setinggi-tingginya 0,96% rata-rata per tahun. Pada tahun 2001 diproyeksikan dengan pertumbuhan 0,97%, selanjutnya diharapkan semakin menurun sampai pada tahun 2005 sebesar 0,94% sehingga jumlah penduduknya diperkirakan 3,276 juta orang lebih dengan kepadatan sekitar 580 orang/km².

2. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)

Laju pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan untuk tahun 2001-2005 rata-rata sebesar 4,48 % per tahun akan dapat mewujudkan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Bali atas dasar harga berlaku selama kurun waktu tersebut sebesar Rp. 108,50 triliun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sebesar 5,25 % diharapkan dapat dicapai pada tahun 2003 sedangkan pada tahun 2004 akan tumbuh lebih rendah dan pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat dengan 4,38 %.

Laju pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha yang memiliki peranan cukup penting dalam pembentukan PDRB Bali adalah sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-saja.

Dalam kurun waktu tahun 2001-2005, akan mengalami perubahan struktur ekonomi secara umum dalam kontribusinya. Kontribusi sektor primer semakin menurun menjadi rata-rata sebesar 21,24 % diimbangi oleh peningkatan sektor sekunder dan sektor tersier masing-masing menjadi 15,92 % dan 62,84 %. Sektor primer pada tahun 2001 sebesar 22,13 % mengalami penurunan sampai tahun 2005 sebesar 20,41 %, sedangkan sektor sekunder pada tahun 2001 sebesar 15,69 % menjadi 16,16 % pada tahun 2005 dan sektor tersier dari 62,18 % tahun 2001 meningkat menjadi 63,43 % pada tahun 2005.

3. PDRB Perkapita

Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin dapat ditekan dari 1,26 % rata-rata per tahun selama kurun waktu tahun 1990-2000 menjadi setinggi-tingginya 0,96 % rata-rata pertahun, sedangkan pertumbuhan ekonomi Bali diproyeksi sebesar 4,48 % per tahun dalam tahun 2001 - 2005, maka akan terjadi peningkatan PDRB perkapita. PDRB perkapita (atas dasar harga berlaku) rata-rata meningkat sebesar 9,2 % per tahun, dengan peningkatan per tahun yaitu tahun 2001 : 7,83 %, tahun 2002 : 9,66 % tahun 2003 : 9,30 %, tahun 2004 : 9,70 % dan pada tahun 2005 meningkat sebesar 9,52 %.

4. Investasi

Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi Bali yang diproyeksikan sebesar 4,48 % per tahun dalam tahun 2001-2005 dibutuhkan dukungan investasi sebesar Rp. 14,63 triliun atau dibutuhkan sebesar 13,48 % dari hasil yang diharapkan yakni dalam wujud PDRB Bali. Jumlah tersebut guna membiayai pembangunan Daerah Bali, peranan sektor swasta, dunia usaha dan swadaya masyarakat diharapkan tetap dominan (63 %) dengan jumlah investasi sebesar Rp. 9,22 triliun, sedangkan pembiayaan yang berasal dari Pemerintah relatif akan semakin menurun (37 %) atau sebesar 5,41 triliun. Pembiayaan Pemerintah lebih difokuskan pada upaya untuk memfasilitasi, peningkatan pelayanan dan memberikan motivasi sesuai dengan paradigma pemberdayaan dalam rangka kemandirian masyarakat.

5. Kesempatan Kerja.

Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, berbagai upaya dan program telah, sedang dan terus dilakukan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk tahun 2001-2005, peningkatan kesempatan kerja diharapkan mencapai 1,11 % rata-rata per tahun. Dengan peningkatan tersebut penyerapan terhadap angkatan kerja akan bertambah dari 96,77 % pada tahun 2001 menjadi 97,90 % pada tahun 2005. Di lain pihak, pencari kerja secara berangsur-angsur dapat ditekan dari 3,23 % menjadi 2,10 % pada tahun 2005. Lapangan usaha yang memiliki peluang menyerap kesempatan kerja cukup besar sampai dengan tahun 2005 adalah disektor pertanian 19,83 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran 24,17 %, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 11,58 %, sektor industri 11,02 % dan sektor jasa-jasa 12,68 %, sedangkan sektor lainnya rata-rata peranannya dibawah 10 %.

6. Inflasi.

Selama kurun waktu beberapa tahun lalu, inflasi menunjukkan kondisi yang cukup stabil dan terkendali hingga mencapai tingkat yang cukup rendah pada tahun 1996. Seiring dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997 yang berdampak sampai sekarang, laju inflasi

beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 sehingga daya beli masyarakat merosot tajam. Guna mendukung stabilitas daerah dan iklim usaha yang kondusif, dengan mengacu pada kondisi dan kecenderungan ditingkat nasional, maka untuk lima tahun mendatang (2001-2005) laju inflasi diharapkan dapat dikendalikan pada kisaran 5-7 %, sehingga pembangunan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta daya beli masyarakat semakin mapan.

Indikator Makro
Pencapaian Visi dan Misi Bali
Tahun 2001 -2005

No.	Indikator Makro	Satuan	Tahun				
			2001	2002	2003	2004	2005
1	Jumlah Penduduk	ribu orang	3.155,03	3.185,41	3.215,83	3.246,28	3.276,77
2	PDRB	Rp. milyar	17.561,67	19.444,72	21.447,06	23.760,44	26.287,36
	a. Sektor Primer	Rp. milyar	3,887,19	4.267,38	4.570,10	4.958,91	5.365,36
	b. Sektor Sekunder	Rp. milyar	2.754,91	3.067,10	3.400,43	3.799,54	4.246,89
	c. Sektor Tersier	Rp. milyar	10.919,57	12,110.25	13.476,53	15.001,99	16.675,10
J	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,83	4.85	5.25	4.12	4.38
4	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	5,59	6.13	6.7	7.35	8.05
5	Investasi	Rp. milyar	2.490,49	3.016.70	3.264,99	2.869,74	2.988,45
6	Investasi Pemerintah	%	38.39	36.75	36.25	37.16	36.76
7	Investasi Swasta/Swadaya Masyarakat	%	61.61	63.25	63.75	62.84	63.24
8	Investasi Terhadap PDRB	%	14.18	15.51	15.22	12.08	11.37
9	Kesempatan Kerja	ribu orang	1.752,09	1.773.29	1.795,81	1.813,95	1.833,56
10	Pencari Kerja	ribu orang	58,46	52.65	45,65	43,16	39,33
		%	3,23	2.88	2.48	2.32	2.1

BAB IV FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Penetapan faktor penentu keberhasilan ini, didasarkan kepada analisis issue-isue strategik dan pilihan dari hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal berupa faktor kekuatan dan lemahannya serta faktor lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada (*Analisis SWOT*). Faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*) ini, merupakan faktor-faktor yang sangat penting dari unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan Strategi Pemerintahan Propinsi Bali dalam mencapai visi dan misinya. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini berfungsi untuk lebih memfokuskan Strategi Pemerintahan Propinsi Bali dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal, berikut ini dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan sebagai berikut:

1. Mantapnya kesadaran dan penegakan hukum untuk mencapai stabilitas politik dan keamanan guna mendukung Bali sebagai daerah tujuan wisata. Faktor ini adalah sebagai penentu keberhasilan guna menjamin keamanan dan ketentraman serta ketertiban di dalam kehidupan masyarakat terutama untuk mendukung Daerah Bali sebagai daerah tujuan utama wisata di Indonesia.
2. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan handal dalam rangka menghadapi globalisasi. Keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Propinsi Bali sangat dipengaruhi oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam era globalisasi yang semakin kompetitif. Kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan pada peningkatan penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Mantapnya pelaksanaan otonomi daerah didukung oleh kerjasama antar daerah yang saling menguntungkan. Diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang penekanannya pada otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten dan Kota sangat diperlukan adanya kerjasama antar dan antar daerah, regional dan internasional yang saling menguntungkan guna memantapkan kemandirian daerah.

4. Adanya keseimbangan pembangunan antar daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Faktor penentu keberhasilan ini sangat dipengaruhi dari rasionalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas yang berwawasan lingkungan dan tekanan penduduk yang terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan pembangunan antar kabupaten/kota, antar pedesaan dan perkotaan. Pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi antar kabupaten/kota, antar pedesaan dan perkotaan menjadi penting, mengingat kondisi objektif Propinsi Bali masih menunjukkan adanya ketimpangan sumber daya ekonomi antar daerah, antar sektor dan antar golongan dimasyarakat.
5. Mantapnya kebudayaan Bali didukung oleh kekokohan identitas budaya, keseimbangan sistemik dan kemampuan menangkal pengaruh yang buruk secara dinamik serta ketahanan sosial masyarakat. Faktor penentu keberhasilan ini secara konseptual, ketahanan budaya Bali merupakan kondisi sistemik dan kondisi dinamik. Bertumpu pada konsep pada Kebudayaan yang luas mencakup ide, dimensi perilaku dan dimensi fisik maka kebudayaan Bali didasarkan kepada : (1) Ketahanan sistem nilai yang pada hakekatnya sebagai ketahanan ini dari kebudayaan yang menjadi benteng budaya paling dalam seperti nilai religius, nilai estetika, nilai solidaritas, nilai harmonis dan nilai keseimbangan; (2) Sistem perilaku dan kelembagaan atau ketahanan struktural seperti desa adat, subak, sekaa dan dadie untuk menghadapi ancaman dari luar. Ketahanan struktural ini termasuk konsep-konsep antara lain *Tri Hita Karana*, *Tri Mandala* dan sebagainya; (3) Sistem fisik yaitu keseluruhan simbol dan benda-benda budaya; (4) Sikap budaya atau ketahanan mental yang merupakan ketahanan dari apresiasi parapendukung kebudayaan Bali; (5) Fungsional yaitu ketahanan sistem religi, bahasa, kesenian, organisasi sosial, sistem peralatan dan mata pencaharian serta sistem ilmu pengetahuan dan teknologi; (6) Sistemik merupakan refleksi dari kekokohan integrasi atau unsur-unsur kebudayaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman; (7) Ketahanan dinamik, baik yang disebabkan, oleh faktor eksternal, maupun internal sebagai refleksi dari kemampuan untuk menolak dan menerima unsur-unsur budaya asing.
6. Adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang mapan dan berkembangnya ekonomi kerakyatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Faktor kunci keberhasilan ini didukung oleh sumber-sumber

pendapatan daerah yang mapan dalam melaksanakan pembangunan. Sumber-sumber pendapatan ini baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi perlu ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk kelanjutan pembangunan terutama pembangunan ekonomi kerakyatan.

7. Adanya aparatur pemerintah yang profesionalisme dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Faktor penentu keberhasilan ini adalah berkaitan dengan pengembangan system administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam rangkamewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB V PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Pengertian Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintahan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah di pahami seluruh masyarakat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan. Keberhasilan mencapai berbagai sasaran sangat penting di tinjau dari :

1. Lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana.
2. Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau Kinerja pemerintahan.
3. Sebagai alat untuk memicu dan memacu, agar semua organisasi pemerintah sadar terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan karena adanya bidang-bidang kegiatan tertentu yang tidak membuahkan hasil padatingkat yang diharapkan.

Pencapaian sasaran agar efektif, harus bersifat spesifik, dapat dimulai, dapat diukur, menantang, namun dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil. Sasaran operasional tahunan ialah pernyataan hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam peranannya terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

5.2. Tujuan dan Sasaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Propinsi Bali, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya

saling terkait. Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1 :

Mewujudkan supremasi dan penegakan hukum serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Tujuan Pertama yang akan dicapai adalah Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum dan HAM

Sasaran :

- a. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum dan HAM
- b. Meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum.
- c. Meningkatnya produk hukum yang mampu mengantisipasi perkembangan pembangunan daerah.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat lahir batin.

Tujuan Pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, derajat kesehatan yang optimal, dan pendapatan masyarakat.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan dan ketrampilan masyarakat.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan sejahtera.

Tujuan Kedua yaitu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia.

Sasaran :

- a. Meningkatnya peluang kesempatan kerja.
- b. Meningkatnya pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna

Misi 3 : Memberdayakan ekonomi rakyat khususnya usaha

kecil, menengah dan koperasi dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan industri agar menjadi tangguh dan mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan Pertama yang akan dicapai adalah meningkatkan pertumbuhan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berbasis ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- b. Meningkatnya nilai tambah dan ekspor.

Tujuan Kedua yang akan dicapai meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam me- numbuhkembangkan sistem ekonomi kerakyatan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar dan BUMN.
- b. Meningkatnya peranan lembaga keuangan desa adat.

Misi 4 : Melaksanakan otonomi daerah dengan mengedepan-

kan jati diri dan kemandirian masyarakat Bali dengan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kemampuan di tingkat lokal, nasional, dan global.

Tujuan Pertama yang akan dicapai adalah meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan potensi sumber daya secara terpadu serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran :

- a. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif.

b. Meningkatnya pemanfaatan sumber potensi daerah secara terpadu.

Tujuan Kedua adalah mewujudkan masyarakat Bali sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa menghilangkan jati diri.

Sasaran adalah meningkatnya kerjasama dan koordinasi pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah propinsi.

Misi 5 : Mewujudkan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka ketahanan sosial budaya yang dinamis dan kondusif

Tujuan Pertama yang akan dicapai adalah meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat keamanan dan ketertiban.

Tujuan Kedua yang akan dicapai Memperkuat ketahanan sosial politik dan budaya.

Sasaran :

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta kesadaran politik.

Misi 6 : Memberdayakan kebudayaan daerah, lembaga-lembagatradisional dan lembaga adat daerah Bali dalam konteks kebudayaan nasional dan global

Tujuan Pertama yang akan dicapai menumbuhkembangkan kebudayaan daerah dan lembaga-lembaga adat/ tradisional. Sasaran :

Meningkatnya peranan kebudayaan daerah dan peranan lembaga-lembaga adat.

Tujuan Kedua adalah melestarikan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat Sasaran :

Lestarnya budaya, adat dan agama serta nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Misi 7 : Mewujudkan Bali sebagai kesatuan yang utuh melalui pemerataan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

Tujuan Pertama yang akan dicapai meningkatkan kesadaran dan persamaan persepsi serta komitmen tentang pengelolaan lingkungan dalam rangka mencapai kelestarian fungsi, daya dukung dan dayatampung lingkungan.

Sasaran :

- a. Berkurangnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagai akibat suatu kegiatan.
- b. Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan Kedua adalah menumbuhkembangkan daerah-daerah yang belum berkembang.

Sasaran :

Meningkatnya pengembangan wilayah secara berimbang dan terpadu.

Tujuan Ketiga adalah mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Sasaran :

Terwujudnya pembangunan sesuai dengan Tata Ruang.

Misi 8 : Menerapkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, dan transparan

serta meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).

Tujuan Pertama yang akan dicapai adalah meningkatkan sistem administrasi publik yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel.

Sasaran :

Meningkatnya disiplin kerja, sistem dan prosedur kerja yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Tujuan Kedua yang akan dicapai adalah meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah.

Sasaran :

- a. Meningkatnya profesionalisme serta kesejahteraan aparatur
- b. Meningkatnya Kinerja aparatur pemerintah.

BAB VI CARA MENCAPAI TUJUAN

Cara mencapai tujuan dari penetapan tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Bab V dapat dicapai melalui kebijaksanaan dan program-program pembangunan daerah Bali dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut

Kebijaksanaan mensosialisasikan produk-produk hukum dan HAM adalah melalui Program penyuluhan hukum dan HAM dengan kegiatan : penyuluhan hukum dan peningkatan desa sadar hukum, orientasi memfasilitasi dan mengkoordinasikan pemasyarakatan HAM dan penyebar luasan produk-produk hukum.

Kebijaksanaan mengembangkan kualitas aparat penegak hukum di lingkungan pemerintah Propinsi melalui program pembinaan peradilan hukum dengan kegiatan : pendayagunaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), pelatihan bantuan hukum dan evaluasi kesadaran dan penegakan hukum dan HAM.

Kebijaksanaan menata, mengkaji, dan mengembangkan produk-produk hukum termasuk hukum adat, melalui program Pertama; Penerapan dan penegakan hukum dengan kegiatan yaitu Peningkatan penataan dan pemantapan teknis penyusunan produk hukum, Orientasi peradilan tata usaha negara dan peningkatan fungsi kontrol dalam penegakan hukum. Kedua : Pembinaan sarana dan prasarana hukum melalui kegiatan yaitu pengembangan sistim jaringan informasi hukum, pembinaan penyusunan awig-awig adat dan evaluasi Perda-perda lama serta penyusunan rancangan Perda.

Kebijaksanaan mengembangkan sistem pendidikan dan ketrampilan masyarakat adalah melalui program-program : Pertama : Pembinaan pendidikan dasar dan pra sekolah melalui kegiatan-kegiatan yaitu : peningkatan pembinaan pendidikan dasar dan pra sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidikan TK, SD, dan SLTP data peningkatan sarana/prasarana pada TK, SD dan SLTP, pemberian insentif guru dan tenaga pendidikan di daerah sulit, pengembangan kurikulum (muatan lokal),

peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dan beasiswa bagi anak kurang mampu dan siswa berprestasi. Kedua : Program pembinaan pendidikan menengah melalui beberapa kegiatan, yaitu peningkatan pendidikan menengah umum dan kejuruan, peningkatan kualitas tenaga pendidikan pada pendidikan menengah umum dan kejuruan, dan peningkatan sarana/prasarana pada sekolah menengah umum dan kejuruan. Ketiga : Pembinaan pendidikan luar dan sekolah luar biasa melalui beberapa kegiatan yaitu Pengembangan kelompok belajar, Pengembangan anak dini usia (PADU), pembinaan Sekolah Luar Biasa, peningkatan pendidikan dan keterampilan luar sekolah. Keempat: Pelatihan dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja melalui kegiatan yaitu Peningkatan pendidikan pelatihan tenaga kerja serta pelatihan instruktur tenaga kerja, pembinaan dan pengembangan lembaga Pelatihan swasta, perusahaan dan produktivitas. Kelima : Pemberdayaan Perempuan melalui kegiatan yaitu Peningkatan pemberdayaan perempuan. Keenam : Pembinaan dan pengembangan pemuda melalui beberapa kegiatan yaitu Peningkatan Pemberdayaan pemuda dan peningkatan partisipasi dan wawasan kepemudaan. Ketujuh : Pembinaan dan pengembangan olah raga dengan kegiatan : Pembinaan olah raga anak usia dini, pemantauan bakat/pembibitan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga.

Kebijaksanaan meningkatkan manajemen dan standar pelayanan kesehatan masyarakat melalui beberapa program yaitu Pertama: Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, melalui dua kegiatan yaitu Pengkajian model kawasan sehat, Pemantapan manajemen dan perencanaan pembangunan kesehatan. Kedua : Pelayanan kesehatan rujukan dan rumah sakit melalui beberapa kegiatan yaitu Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit, peningkatan kualitas tenaga pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah, dan peningkatan manajemen pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah. Ketiga : Pelayanan Kesehatan masyarakat melalui beberapa kegiatan yaitu Meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas, Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat dan Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Keluarga miskin.

Kebijaksanaan meningkatkan sumber daya kesehatan melalui dua program Pendidikan pelatihan tenaga kesehatan, dengan beberapa kegiatan yaitu Peningkatan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, Meningkatkan

sarana dan prasarana pendidikan tenaga kesehatan serta Meningkatkan dan mengembangkan institusi pendidikan tenaga kesehatan.

Kebijaksanaan peningkatan kesehatan lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat melalui beberapa program yaitu Pertama: Pengawasan obat makanan dan bahan berbahaya dengan kegiatan Pemantauan dan pengawasan produksi obat dan makanan, dan Penyuluhan obat, makanan dan bahan berbahaya. Kedua : Pencegahan dan pemberantasan penyakit melalui beberapa kegiatan yaitu : Peningkatan surveilant penyakit menular dan tidak menular Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular, dan Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman dan pengamanan pestisida dan peningkatan penanggulangan HTV/ AIDS. Ketiga: Perbaikan gizi melalui beberapa kegiatan yaitu: Memantapkan sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), Mengembangkan dan meningkatkan gizi masyarakat, dan Pengawasan dan pembinaan program PMTAS dan usaha perbaikan institusi. Keempat: Pembinaan pengobatan tradisional dengan kegiatan: Pengembangan obat tradisional dan Pembinaan pemanfaatan obat-obat tradisional.

Kebijaksanaan peningkatan perilaku, kemandirian masyarakat, serta kemitraan melalui program-program : Pertama : Penyuluhan kesehatan masyarakat dengan kegiatan : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Pelayanan dan pengembangan kualitas kesehatan remaja dan Meningkatkan pembiayaan dari masyarakat dan swasta serta memasyarakatkan olah raga. Kedua : Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan kegiatan: Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan keluarga miskin. Ketiga : Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui kegiatan : Rehabilitasi Sosial dan Penanggulangan korban bencana. Keempat: Kependudukan dengan kegiatan-kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan mobilitas penduduk, Pengembangan pembinaan administrasi penduduk dan Peningkatan pemberdayaan sistem dan SDM dibidang kependudukan. Kelima : Keluarga Berencana dengan kegiatan Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Pengembangan peserta KB bagi keluarga pra KS dan KS.

Kebijaksanaan meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui dua program yaitu : Pertama: Pembangunan Kota dengan kegiatan : Perbaikan lingkungan perkotaan dan Pembangunan perkotaan.

Kedua : Pembangunan Desa melalui beberapa kegiatan : Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, Peningkatan daya guna pemerintahan desa serta Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa.

Kebijaksanaan memperluas Kesempatan Kerja dan Berusaha dengan memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal melalui program Pertama: Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja dengan kegiatan : Peningkatan pelaksanaan Padat Karya, dan Pemberdayaan penyandang masalah sosial perluasan kesempatan kerja. Kedua: Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja dengan kegiatan : Penanggulangan pekerja anak pengembangan hubungan industrial, perlindungan dan kesejahteraan pekerja, penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial/PHK dan pengembangan hygiene dan kesehatan tenaga kerja. Ketiga : Penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja dengan kegiatan: pendayagunaan tenaga kerja, penyuluhan dan penyebarluasan informasi ketenaga kerjaan. Keempat : Pembinaan dan pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja dengan kegiatan : Pengembangan produktivitas tenaga kerja dan Pengembangan efektifitas lembaga kerja sama.

Kebijaksanaan meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK melalui program-program yaitu Pertama : Penelitian IPTEK dengan kegiatan: Penelitian daya dukung daerah, Penelitian di bidang ekonomi dan sosial budaya, Pengkajian aspek-aspek yang mendukung perencanaan pembangunan. Kedua : Pengembangan IPTEK dengan kegiatan : Pemasyarakatan teknologi tepat guna dan Perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan telematika. Ketiga : Penyempurnaan dan pengembangan statistik dengan kegiatan : Pengembangan Sistem Informasi pembangunan, Penyusunan evaluasi pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data, Perencanaan dan Pengendalian pembangunan Daerah, Pengembangan data Statistik dan Inventarisasi swadaya murni masyarakat dan swadaya penunjang.

Kebijaksanaan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi melalui program Pertama : Pengembangan sistem pendukung usaha pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan kegiatan : Pemberdayaan SDM pengusaha kecil, menengah dan koperasi serta Pengembangan sistem informasi usaha daerah. Kedua : Pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah dengan kegiatan :

Pemberdayaan usaha dan kelembagaan koperasi dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil dan Menengah.

Kebijaksanaan peningkatan daya saing ekspor daerah melalui program-program Pertama : Pengembangan kerja sama ekonomi luar negeri dengan kegiatan : Pengembangan/perencanaan kerjasama antar daerah, regional dan internasional dan Pengembangan dan pengendalian kerjasama antar daerah, regional dan internasional. Kedua : Pengembangan ekspor dengan kegiatan: Peningkatan dan Pengembangan ekspor serta Peningkatan kualitas institusi jasa layanan pengembangan bisnis.

Pengembangan komoditas andalan, unggulan dan rintisan melalui program : Pengembangan agribisnis dengan kegiatan pengembangan agribisnis tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan.

Kebijaksanaan mengembangkan iklim usaha yang kondusif untuk mendukung kemitraan antara koperasi pengusaha kecil dengan pengusaha besar dan BUMN/D melalui program : Pengembangan kewirausahaan dan daya saing Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan kegiatan Pemberdayaan kemitraan usaha pengusaha kecil menengah dan koperasi, Dukungan perkuatan kepada kelompok perajin/unit usaha yang baru tumbuh dan berkembang dan Promosi produk industri kecil di tingkat daerah dan nasional serta gelar potensi industri.

Kebijaksanaan meningkatkan keberdayaan lembaga keuangan desa adat melalui program : Pengembangan lembaga keuangan dengan kegiatan Pengembangan lembaga koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dan lembaga keuangan mikro dan Peningkatan manajemen keuangan desa adat.

Kebijaksanaan meningkatkan produktivitas dan produksi masyarakat adalah melalui beberapa program yaitu : Pertama : Peningkatan petahanan pangan dengan kegiatan : Pengembangan produksi tanaman pangan, Pengembangan produksi peternakan, Pengembangan produksi kehutanan, Pengembangan kawasan sentra produksi, Pengembangan lumbung pangan masyarakat desa dan pengembangan produksi Perkebunan, Kedua : Pengelolaan dan Pengembangan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Peternakan dengan Kegiatan : Pengembangan dan

pemanfaatan Perikanan dan Kelautan serta Peternakan dan Pengembangan sentra-sentra produksi Perikanan dan Peternakan. Ketiga : Pengawasan, Pengendalian dan konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan: Pengawasan dan Pengendalian konservasi sumber daya Perikanan dan Kelautan, serta Pengembangan potensi sumber daya Perikanan. Keempat : Pengembangan pariwisata dengan kegiatan Promosi/Pemasaran Pariwisata serta Pengembangan dan pengendalian usaha kepariwisataan kawasan, obyek dan daya tarik wisata. Kelima : Pengembangan dan pengelolaan produk wisata dengan kegiatan Peningkatan kualitas SDM pariwisata serta pendataan dan pembinaan kepariwisataan. Keenam : Pembinaan dan pengembangan industri dengan kegiatan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah serta Pengembangan usaha ekonomi. Ketujuh : Pengembangan perdagangan dalam negeri dengan kegiatan : Pengembangan perdagangan Dalam Negeri dan promosi dagang komoditi unggulan.

Kebijaksanaan debirokratisasi deregulasi perijinan investasi melalui program Pengembangan penanaman modal dengan kegiatan Pengembangan dan promosi penanaman modal, Forum komunikasi dan temu usaha penanaman modal dan Peningkatan pelaksanaan penanaman modal dan pengendalian penanaman modal.

Kebijaksanaan optimalisasi pengelolaan potensi daerah secara terpadu melalui program Pertama : Pembinaan dan pengembangan pertambangan dengan kegiatan Pengembangan kegiatan Pertambangan serta Pengendalian usaha Pertambangan. Kedua : Pengembangan Otonomi Daerah dengan kegiatan Pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah dan Peningkatan kerjasama antar daerah, dan internasional. Ketiga: Pembinaan dunia usaha dengan kegiatan Penyuluhan kepada wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED).

Kebijaksanaan meningkatnya pola/bentuk kerjasama dan koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah propinsi melalui program-program Pertama : Pembangunan daerah bawahan dengan kegiatan Koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara pemerintah Propinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota se Bali dan Dukungan perkuatan pembangunan Kabupaten/Kota. Kedua : Pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan. Pengembangan kawasan terpadu dan Pemberdayaan masyarakat miskin.

Kebijaksanaan meningkatkan profesionalisme dan jumlah aparat keamanan dan ketertiban melalui program Pengembangan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan kegiatan Pembekalan teknis dan pengadaan peralatan aparat trantib, Forum komunikasi dan konsultasi komponen masyarakat dan Pemberdayaan masyarakat terhadap demokrasi Pancasila dan organisasi kemasyarakatan dan pemberdayaan kelinmasan.

Kebijaksanaan meningkatkan sistem komunikasi politik, pengamanan desa adat dan sistem keamanan lingkungan melalui program-program Pertama : Pembinaan kekuatan rakyat dengan kegiatan Peningkatan kewaspadaan terhadap penanggulangan bencana, Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap stabilitas politik dan kamtibmas dan Pengembangan jaringan sistem informasi dan komunikasi di bidang deteksi dini. Kedua : Belanegara dengan kegiatan Pendidikan dan latihan bela negara, Ketiga, Pembinaan politik dengan kegiatan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Keempat, pengembangan operasional penerangan dengan kegiatan peningkatan operasional penerangan.

Kebijaksanaan mengembangkan kebudayaan daerah sesuai dengan jati dirinya melalui program-program : Pertama : Pembinaan kesenian dengan kegiatan Persiapan dan penyelenggaraan pesta seni, Pengembangan seni budaya dan Pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional, pengembangan hak paten kesenian dan penghargaan seni Darma Kusuma. Kedua : Pembinaan kebahasaan, kesusasteraan dan keputakaan dengan kegiatan Pemberdayaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, Pembinaan, pelestarian dan pengembangan perpustakaan, Pengembangan dokumentasi budaya Bali, penyalinan, alih aksara dan alih bahasa naskah, lontar serta Revitalisasi sastra Bali modern.

Kebijaksanaan meningkatkan peran dan fungsi lembaga tradisional, lembaga adat, peninggalan sejarah dan permusiuman melalui program Pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman dengan kegiatan Pemantapan lembaga adat, Pemberdayaan permuseuman, dan Peningkatan peran desa adat subak dan sekehe-sekehe, pemantapan peranan lembaga-lembaga seni formal dan revitalisasi sektor-sektor tradisional.

Kebijaksanaan meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai budaya, adat, dan agama serta nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam rangka memperkuat kebudayaan nasional melalui program-program

Pertama : Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dengan kegiatan Peningkatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan, Pemeliharaan dan pelestarian benda bersejarah, sosialisasi dan pendalaman nilai-nilai dasar kebudayaan Bali, Pelestarian nilai-nilai dasar budaya dan tradisi dan penghargaan kepada kebudayaan, peningkatan kualitas subyek, penanggung kebudayaan Bali dan pengembangan informasi kebudayaan serta peningkatan ketahanan sistim religi, bahasa, kesenian, organisasi sosial dan mata pencaharian masyarakat Bali. Kedua : Peningkatan sarana kehidupan beragama dengan kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kehidupan beragama dan Peningkatan efektifitas lembaga keagamaan. Ketiga : Penerangan, bimbingan dan kerukunan hidup beragama dengan kegiatan Bimbingan dan penyuluhan kehidupan beragama dan Peningkatan kerukunan umat beragama.

Kebijaksanaan meningkatkan pengawasan dan pengendalian pen-cemaran dan kerusakan lingkungan melalui program Pengendalian pencemaran dan rehabilitasi kerusakan lingkungan dengan kegiatan : Pengendalian kerusakan lingkungan usaha pertambangan, Pengawasan teknis pemakaian air bawah tanah/air permukaan, Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan Pemantauan dan pemulihan lingkungan.

Kebijaksanaan meningkatkan pengelolaan lingkungan alam yang meliputi ekosistem daratan, pesisir dan laut serta alam atmosfer melalui program-program : Pertama : Peningkatan efektifitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dengan kegiatan Pembuatan sumur resapan dan sumur pantau. Penataan dan rehabilitasi hutan. Pengelolaan daerah aliran sungai, Peningkatan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam hayati. Kedua : Pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir dan laut dengan kegiatan Pengendalian reklamasi lahan sungai dan pantai, Pengamanan daerah pantai dan Pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu.

Kebijaksanaan meningkatkan pengawasan, penindakan dan pe-negakan hukum melalui program Penataan kelembagaan dan penegakan hukum dalam pelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan Perkuatan kelembagaan pengelolaan lingkungan, Penegakan hukum lingkungan, Pembinaan dan penyuluhan hukum lingkungan.

Kebijaksanaan mewujudkan kesamaan persepsi dan sikap semua pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program Pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan kegiatan Pengembangan sistem informasi lingkungan, Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemetaan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan

Kebijaksanaan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui program Peningkatan peranan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan kegiatan Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, Peningkatan peran sekolah dan perguruan tinggi dalam pengelolaan lingkungan dan Peningkatan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan.

Kebijaksanaan mengembangkan daerah potensial dengan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai melalui program-program yaitu Pertama : Pengusahaan sumber-sumber air dan penyediaan air baku dengan kegiatan Perencanaan teknis sumber-sumber air dan operasi dan pemeliharaan, pengamanan danau, waduk dan sumber air. Kedua : Pengembangan dan pengembangan jaringan irigasi dengan kegiatan: operasi dan pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan jaringan irigasi, Perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, lintas Kabupaten/ Kota dan penanggulangan bencana alam. Ketiga : Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan berkala dan rutin.

Keempat : Peningkatan jalan dan penggantian jembatan dengan kegiatan peningkatan jalan dan penggantian jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan.

Kelima : Pembangunan transportasi jalan dengan kegiatan pembangunan Jalan dan Jembatan. Keenam : Perbaikan perumahan permukiman dengan kegiatan Penataan lingkungan permukiman, Pembangunan drainase, Penanganan persampahan dan air limbah, penanganan air bersih. Ketujuh : Pengembangan perumahan dengan kegiatan Perbaikan kawasan kumuh dan Perbaikan lingkungan perumahan dan pemukiman. Kedelapan: Penataan bangunan dengan kegiatan Pelestarian/ Penataan desa tradisional dan Penataan bangunan dan lingkungan. Kesembilan :

Restrukturisasi bidang energi dengan kegiatan Pengembangan tenaga listrik alternatif.

Kebijaksanaan meningkatkan sistem pelayanan jasa perhubungan, meteorologi dan geofisika yang handal dan terpadu melalui program yaitu Pertama, Pengembangan aksesibilitas dengan kegiatan Pengawasan dan pengendalian pelayanan jasa Asosiasi/Perusahaan jasa pengurusan transportasi darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Kedua, Pengembangan Keselamatan Lalu -lintas Jalan dengan kegiatan pemeliharaan/Pengadaan dan fasilitas keselamatan lalu-lintas jalan propinsi.

Kebijaksanaan mengembangkan penataan ruang wilayah sesuai peruntukannya melalui program-program Pertama: Penataan ruang dengan kegiatan Perencanaan tata ruang dan Pengendalian pemanfaatan tata ruang. Kedua : Pengelolaan pertanahan dengan kegiatan penataan administrasi pertanahan, dan penataan Tata guna tanah.

Kebijaksanaan meningkatkan disiplin aparatur pemerintah dengan pengawasan melekat melalui Program Pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan dengan kegiatan : Pendayagunaan sistem dan pelaksanaan Pengawasan (Fungsional, Waskat, Wasnas), Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, Bimtek manajemen Harga Perhitungan Sendiri/owner estimate (BTMOE), Penyusunan standarisasi harga barang/jasa dan Peningkatan pengelolaan barang daerah.

Kebijaksanaan meningkatkan sistem dan prosedur kerja aparat pemerintah melalui program Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan kegiatan: Penataan dan pendayagunaan organisasi perangkat daerah, Penataan sistem ketatalaksanaan, Peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja pegawai dan Penyusunan LAKIP Propinsi Bali.

Kebijaksanaan meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparatur pemerintah melalui program-program Pertama: Penyempurnaan prasarana fisik pemerintah dengan kegiatan : Peningkatan prasarana fisik kantor pemerintah, dan Rehab prasarana fisik kantor pemerintah Kedua: Pengadaan perlengkapan dan peralatan dengan kegiatan Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor pemerintah, Inventarisasi aset-aset daerah, peningkatan penataan dana pemanfaatan aset daerah.

Kebijaksanaan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui program-program : Pertama : Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dengan kegiatan Analisis jabatan, Analisis kebutuhan diklat, Pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, tenaga teknis dan fungsional. Peningkatan pendidikan kader aparatur, Bimtek pemahaman peraturan kepegawaian dan Penataan administrasi kepegawaian. Kedua: Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah dengan kegiatan Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan Peningkatan pemeliharaan kesehatan pegawai sertapensiunan.

Kebijaksanaan meningkatkan prinsip-prinsip manajemen dan akuntabilitas aparatur pemerintah melalui program Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kegiatan : Pengembangan standar pelayanan, Peningkatan operasional penerangan, penyebarluasan informasi pembangunan, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pembangunan daerah dan Penataan arsip daerah.

BAB VII

PENUTUP

Setelah mengkaji seluruh peraturan perundangan yang ada seperti UU. No. 22/1999, UU No. 25/1999 dan PP. No. 25/2000, otonomi daerah tidak hanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetapi juga pelimpahan peran dari pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu seluruh masyarakat Bali perlu menyamakan persepsi, sampai sejauh mana posisi dan peran pemerintah propinsi Bali dalam upaya mensejahterakan masyarakat Bali.

Pelaksanaan otonomi daerah telah mengurangi peran pemerintah propinsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini membawa konsekuensi dan makna bahwa : Pertama, keberhasilan dan kegagalan pembangunan adalah kontribusi kita semua; Kedua, peran masyarakat harus lebih mengemuka; **ketiga**, pemerintah kabupaten dan kota harus lebih dominan, karena peran propinsi sebagian besartelah bergeser dari pelaksana menjadi fasilitator.

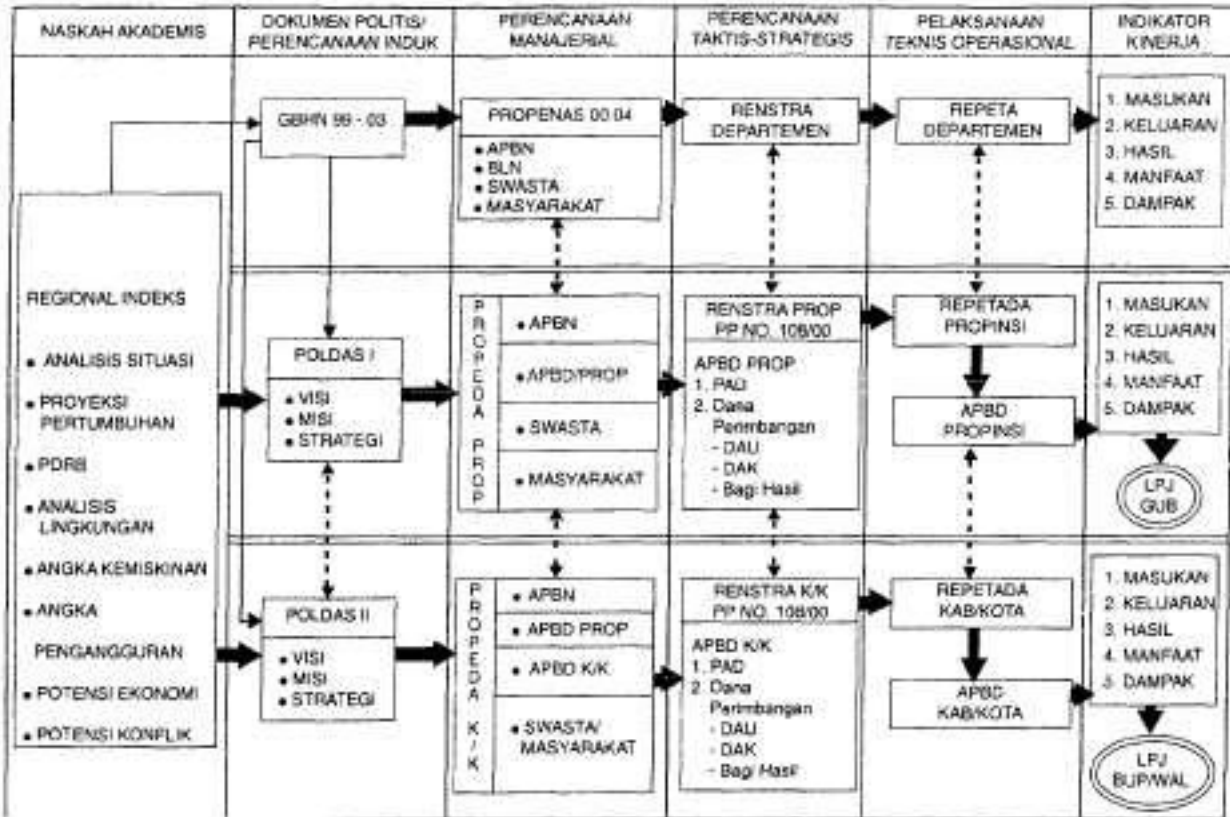
Kesemuanya itu bisa dicapai bila kita bersama dapat menciptakan kepastian hukum, keamanan, dan stabilitas politik. Hal ini menjadi satu kesatuan strategi utama pembangunan Bali kedepan, demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Propinsi Bali, yaitu terwujudnya masyarakat Bali sejahtera yang berlandaskan *Tri Hita Karana* untuk melaksanakan pembangunan Bali berkelanjutan.

Untuk mencapai visi tersebut telah disusun Rencana Strategik Pemerintah Propinsi Bali sesuai dengan amanat PP. No. 25/2000 dan PP. No. 108/2000. Dokumen Rencana Strategik Pemerintah Propinsi Bali terbuka untuk dikritisi oleh semua pihak demi pengabdian kita kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya rencana strategik ini sangat ditentukan oleh semua pihak baik eksekutif, legislatif, dan masyarakat.

Demikian semoga dokumen ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi Pemerintah Propinsi Bali.

TATA URUT DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN



MATRIK RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) PROPINSI BALI 2002-2005

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBUKUSAJIAN	PROGRAM	KEGIATAN	
<p>Terdapatnya manusia dan masyarakat Bali sebagai keadilan, kesejahteraan yang abadi, berkeadilan, damai, sehat, sejahtera, dan berkeadilan religius, dan berkeadilan pada tingkat 70-80% Keadan yang dimiliki oleh Agama Hindu dan Buddha dan tingkat dua manusia yang moral untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan</p>	<p>1. Meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.</p>	<p>1.1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik</p>	1.1.1. Meningkatkan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.1.1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1.1.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	1.1.1.1.1.1.1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	
			1.1.2. Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara dan pelayanan publik	1.1.2.1. Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara dan pelayanan publik	1.1.2.1.1. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara dan pelayanan publik	1.1.2.1.1.1. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara dan pelayanan publik	1.1.2.1.1.1.1. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara dan pelayanan publik
			1.1.3. Meningkatkan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.3.1. Meningkatkan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.3.1.1. Peningkatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.3.1.1.1. Peningkatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.3.1.1.1.1. Peningkatan pelayanan dan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
	<p>2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.</p>	<p>2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.</p>	2.1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.1.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.1.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.1.1.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.
			2.1.2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.2.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.2.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.2.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.2.1.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.
			2.1.3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.3.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.3.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.3.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.3.1.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.
			2.1.4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.4.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.4.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.4.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.4.1.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.
			2.1.5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.5.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.5.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.5.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.5.1.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.
			2.1.6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.6.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.6.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.6.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.6.1.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.
			2.1.7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.7.1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.7.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.7.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.	2.1.7.1.1.1.1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif yang mampu bersaing di pasar global.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
						2.1.1.1.3 Peningkatan Sarana / Prasarana pada TK, SD dan SLTP 2.1.1.1.4 Pemberian insentif guru dan tenaga pendidikan di daerah sulit. 2.1.1.1.5 Pengembangan kurikulum (muatan lokal) 2.1.1.1.6 Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan 2.1.1.1.7 Beasiswa bagi anak kurang mampu dan siswa berprestasi. 2.1.1.1.2 Pembinaan Pendidikan Menengah. 2.1.1.1.2.1 Peningkatan pendidikan menengah umum dan kejuruan 2.1.1.1.2.2 Peningkatan kualitas tenaga pendidik pada pendidikan 2.1.1.1.2.3 Peningkatan sarana / prasarana pada sekolah menengah umum dan kejuruan 2.1.1.3 Pembinaan Pendidikan luar sekolah dan Sekolah Luar Biasa 2.1.1.3.1 Pengembangan Kelompok Belajar. 2.1.1.3.2 Pengembangan anak dini usia (PADU) 2.1.1.3.3 Pembinaan Sekolah Luar Biasa

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
			Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan manajemen dan standar pelayanan kesehatan masyarakat.	<p>Pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja</p> <p>Pemberdayaan Perempuan</p> <p>Pembinaan dan pengembangan pemuda</p> <p>Pembinaan dan pengembangan olah raga</p> <p>Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan</p>	<p>2.1.1.1.3.4 Peningkatan pendidikan dan ketrampilan Luar Sekolah</p> <p>2.1.1.1.4.1 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja. Pelatihan instruktur tenaga kerja.</p> <p>2.1.1.1.4.3 Pembinaan dan Pengembangan lembaga pelatihan swasta, perusahaan dan produktivitas</p> <p>2.1.1.1.5.1 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>2.1.1.1.6.1 Pembinaan dan Pengembangan Pemuda Peningkatan partisipasi dan wawasan kepemudaan.</p> <p>2.1.1.1.6.2 Pembinaan olah raga anak usia dini</p> <p>2.1.1.1.7.1 Pemantauan bakat / pembibitan olah raga</p> <p>2.1.1.1.7.2 Peningkatan prestasi olah raga</p> <p>2.1.1.1.7.3 Peningkatan prestasi olah raga</p> <p>2.1.2.1.1.1 Pengkajian Model Kawasan serial</p>

o

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBUAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
					2.1.2.1.2 Pelayan ke-sehat-an rujukan dan ru-mah sakit	2.1.2.1.1.2 Pemanlapan mana-jemen dan perencana-an pembangun-an ke-sehatan 21.2.1.2.1 Pentngkalan sarana dan prasarana pelayan- an kesehatan rumah sakit 2.1.2.1.2.2 Peningkatan kualilas tenaga pelayanan ke sehatan rumah sakit umum daerah 2.1.2.1.2.3 Peningkatan mana- jemen pelayanan kese- hatan rumah sakit umum daerah 2.1.2.13 Pelayan Kesehal-1212.1.31 an masyarakat Meningkatkan sarana dan prasarana pus-kesmas 2.1.2.1.3.2 Meningkatkan dan me-ngembangkan pelayanan kesehatan masy-aiakat 2.1.2.1.3.3 Meningkatkan pelayan- an kesehatan bagi Keluarga masyarakat miskin 2.1.2.2.1 Pendidikan pela-tihan tenaga kesehatan 2.1.2 2.1.1 Peningkatan pendidik- an dan pelatihan te-

2.1.2.2 meningkatkan
sum-ber daya
kesehatan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
			<p>2.1.3 Meningkatkan peran serta masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan sejahtera</p>	<p>2.1.3.1 Peningkatan kesehatan lingkungan dan perlindungan kesehatan masyarakat</p>	<p>2.1.3.1.1 Pengawasan obat makanan dan bahan berbahaya</p> <p>2.1.3.1.2 Pencegahan dan pembantasan penyakit</p> <p>2.1.3.1.3 Perbaikan gizi</p>	<p>2.1.2.2.1.2 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan tenaga kesehatan</p> <p>2.1.2.2.1.3 Meningkatkan dan mengembangkan institusi pendidikan tenaga kesehatan.</p> <p>2.1.3.1.1.1 Pemantauan dan pengawasan produksi obat dan makanan</p> <p>2.1.3.1.1.2 Penyuluhan obat, makanan dan bahan berbahaya</p> <p>2.1.3.1.2.1 Peningkatan serveilansi penyakit menular dan tidak menular</p> <p>2.1.3.1.2.2 Peningkatan pencegahan dan pembantasan penyakit menular dan tidak menular</p> <p>2.1.3.1.2.3 Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan pengamanan pestisida</p> <p>2.1.3.1.2.4 Peningkatan penanggulangan HIV/AIDS</p> <p>2.1.3.1.3.1 Memantapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)</p>

to

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
						2.1.31.3.2 Mengembangkan meningkatkan gizi masyarakat
						2.1.3.1.3.3 Pengawasan dan pembinaan program PMTAS dan usaha perbaikan institusi
					2.1.3.1.4 Pembinaan peng-obatan tadisional	2.1.3.1.4.1 Pengembangan obat tradisional
						2.1.3.1.4.2 Pembinaan pemanfaatan obat - obat tradisional
				2.1.3.2 Peningkatan perilaku, kemandirian masyarakat, serta kemitra-an	2.1.3.2.1 Penyuluhan kesehatan masyarakat	2.1.3.2.1.1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan
						2.1.3.2.1.2 Pelayanan dan pengembangan kualitas kesehatan remaja
						2.1.3.2.1.3 Meningkatkan pembiayaan masyarakat
						2.1.3.2.1.4 Pemasarakan olah raga
					2.1.3.2.2 Pemberdayaan dan kesejahteraan ke-uarga	2.1.3.2.2.1 Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan
						2.1.3.2.2.2 Pemberdayaan ke-luarga miskin.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
					2.1.3.2.3 Kependudukan	2.1.3.2.3.1 Pembinaan dan Pengembangan Mobilitas penduduk 2.1.3.2.3.2 Pengembangan pembinaan administrasi penduduk 2.1.3.2.3.3 Peningkatan pemberdayaan sistem dan SDM dibidang kependudukan
					2.1.3.2.4 Keluarga Berencana	2.1.3.2.4.1 Peningkatan pebyanan 2.1.3.2.4.2 Pengembangan peserta KB bagi keluarga
				2.1.3.3 Meningkatkan pemerataan pembangunan	2.1.3.3.1 Pembangunan Kota	2.1.3.3.1.1 2.1.3.3.1.2 pra KS dan KS Perbaikan lingkungan perkotaan Pembangunan perkotaan
					2.1.3.3.2 Pembangunan Desa	2.1.3.3.2.1 Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa 2.1.3.3.2.2 Peningkatan dayaguna pemerintahan desa. 2.1.3.3.2.3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
		2.2 Meningkatkan profesionalisme SDM	2.2.1 Meningkatnya kesempatan kerja	2.2.1.1 Memperluas Kesempatan Kerja dan Berusaha dengan memprioritaskan Tenaga Kerja Lokal	<p>2.2.1.1.1 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja</p> <p>2.2.1.1.2 Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja</p> <p>2.2.1.1.3 Penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja</p> <p>2.2.1.1.4 Pembinaan dan pengembangan produktivitas dan kesempatan kerja</p>	<p>2.2.1.1.1.1 Peningkatan Pelaksanaan Padat Karya</p> <p>2.2.1.1.1.2 Pemberdayaan penyandang masalah sosial</p> <p>2.2.1.1.1.3 Perluasan kesempatan kerja</p> <p>2.2.1.1.2.1 Penanggulangan Pekerja Anak</p> <p>2.2.1.1.2.2 Pengembangan hubungan industrial, perlindungan dan kesejahteraan pekerja.</p> <p>2.2.1.1.2.3 Penyelesaian kasus persefahan hubungan industrial/PHK</p> <p>2.2.1.1.2.4 Pengembangan hygiene dan kesehatan tenaga kerja.</p> <p>2.2.1.1.3.1 Pendayagunaan tenaga kerja</p> <p>2.2.1.1.3.2 Perencanaan tenaga kerja, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kelenaga kerjaan</p> <p>2.2.1.1.4.1 Pengembangan Produktivitas tenaga kerja</p> <p>2.2.1.1.4.2 Pengembangan efektivitas lembaga kerjasama</p>

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
			2.2 2 Meningkatnya pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna	2.2.2.1 Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK	2.2.21.1 Penelitian IPTEK 2.2.2.1.2 Pengembangan IPTEK 2.2.2.1.3 Penyempurnaan dan Pengembangan statistik	2.2.2.1.1. Penelitian daya dukung daerah 2.2.2.1.2. Penelilian dibidang ekonomi dan sosial budaya 2.2.2.1.3 Pengkajian Aspek-Aspek yang Mendukung Perencanaan Pembangunan 2.2.2.1.2.1 Pemasyarakalan Teknologi Tepat Guna 2.2.2.1.2.2 Perencanaan pembangunan daerah 2.2.2.1.2.3 Pengembangan tele-matika 2.2.2.1.3.1 Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan 2.2.2.1.3.2 Penyusunan evaluasi Pembangunan. 2.2.2.1.3.3 Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 2.2.2.1.3.4 Pengembangan data Statistik. 2.2.2.1.3.5 Inventarisasi swadaya masyarakat dan swadaya penunjang

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
	3. Memberdayakan ekonomi rakyat khususnya usaha kecil menengah dan koperasi dalam bidang pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, kehutanan perkebunan, pariwisata dan industri agar menjadi tangguh dan mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat	3.1. Meningkatkan pertumbuhan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berbasis ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar	3.1.1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengusaha kecil menengah dan koperasi 3.1.2, Meningkatnya nilai tambah dan ekspor	3.1.1.1. Pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi 3.1.2.1. Peningkatan daya saing ekspor daerah 3.1.2.2 Mengembangkan komoditi andalan unggulan dan rintisan	3.1.1.1.1 Pengembangan sistem pendukung usaha pengusaha kecil, menengah dan koperasi 3.1.1.1.2 Pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah 3.1.2.1.1 Pengembangan kerja sama ekonomi luar negen 3.1.2.1.2 Pengembangan ekspor 3.1.2.2.1 Pengembangan agribisnis.	3.1.1.1.1 Pemberdayaan SDM pengusaha kecil, menengah dan koperasi 3.1.1.1.2 Pengembangan sistem informasi usaha daerah 3.1.1.2.1 Pemberdayaan usaha dan kelembagaan koperasi 3.1.1.2.2 Pemberdayaan Pengusaha Kecil dan Menengah 3.1.2.1.1 Pengembangan / Perencanaan kerjasama antar daerah, regional dan internasional 3.1.2.1.1.2 Pengendalian kerjasama regional dan internasional 3.1.2.1.2.1 Peningkatan dan pengembangan Ekspor. 3.1.2.1.2.2 Peningkatan kualitas institusi jasa layanan pengembangan bisnis 3.1.2.2.1.1 Pengembangan agribisnis tanaman pangan 3.1.2.2.1.2 Pengembangan agribisnis peternakan 3.1.2.2.1.3 Pengembangan agribisnis perkebunan 3.1.2.2.1.4 Pengembangan agribisnis perikanan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
		<p>3.2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam menumbuhkan sistem ekonomi ke- ■ rakyatan</p>	<p>3.2.1 Meningkatnya ke- mitraan usaha ke- cil, menengah koperasi dengan pengusaha besar dan BUMN</p> <p>3.2.2. Meningkatnya peran lembaga ke- uangandesaadat</p> <p>3.2.3. Meningkatnya pen- dapatan petani.</p>	<p>3.2.1.1 Mengembangkan iklim usaha yang kondusif untuk men- dukung kemittaan antara Koperasi, Pe- ngusaha Kecil de- ngan Pengusaha Besar dan BUMN / BUMD.</p> <p>3.2.2.1 Meningkatkan ke- berdayaan lembaga keuangan desa adat</p> <p>3.2.3.1 Meningkatkan pro- duktivitas dan pro- duksi pertanian.</p>	<p>3.2.1.1.1. Pengembangan ke- wirausahaan dan daya saing peng- usaha Kecil Mene- ngah dan Koperasi</p> <p>3.2.2.1.1 Pengembangan lembaga keuangan</p> <p>3.2.3.1.1 Peningkatan Keta- hanan pangan</p>	<p>3.1.2.2.1.5 Pengembangan agri- bisnis kehutanan</p> <p>3.2.1.1.1.1 Pemberdayaan dan Ke- mitraan Usaha Kecil Menengah dan Kope- rasi</p> <p>3.2.1.1.1.2 Dukungan kekuatan kepada kelompok pe- rajin / unit usaha yang baru tumbuh S ber- kembang</p> <p>3.2.1.1.1.3 Promosi produksi in- dustri kecil di tingkat daerah & nasional serta gelar potensi industri</p> <p>3.2.2.1.1.1 Pengembangan lem- baga Koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi dan lembaga keuangan mikro</p> <p>3.2.2.1.1.2 Peningkatan mana- jemen keuangan desa adat.</p> <p>3.2.3.1.1.1 Pengembangan pro- duksi tanaman pangan</p> <p>3.2.3.1.1.2 Pengembangan pro- duksi Peternakan</p> <p>3.2.3.1.1.3 Pengembangan pro- duksi Kehutanan</p>

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
			3.2.4, Meningkatkan usaha dan pengembangan pariwisata	3.2.41 Meningkatkan produk industri pariwisata	3.2.4,1.1 Pengembangan pariwisata	3.2.3.1.1.4 Pengembangan kawasan sentra produksi. 3.2.3.1.1.5 Pengembangan dan Tingkatan Pengetahuan Petani 3.2.3.1.1.6 Pengembangan produksi Perkebunan. 3.2.3.1.2, Pengeloaian dan Pengembangan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta Peternakan 3.2.3.1.2.1 Pengembangan dan pemanfaatan Perikanan dan Kelautan. 3.2.3.1.2.2 Pengembangan sentra produksi Perikanan 3.2.3.1.2.3 Pengembangan sentra produksi Peternakan 3.2.3.1.3 Pengawasan, Pengendalian dan konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 3.2.3.1.3.1 Pengawasan dan pengendalian konservasi sumber daya perikanan dan kelautan 3.2.3.1.3.2 Pengembangan potensi sumber daya perikanan 3.2.4.1.1,1 Promosi/Pemasaran Pariwisata 3.2.4.1.1.2 Pengembangan dan pengendalian usaha kepariwisataan, kawasan, obyek dan daya tarik wisata

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
	<p>4. Melaksanakan otonomi daerah dengan mengedepankan jati diri dan kemandirian masyarakat Bali dengan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan lokal, nasional, dan global</p>	<p>4.1. Meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan potensi sumber daya secara terpadu serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</p>	<p>3.2.5. Meningkatkan usaha dan pengembangan industri kecil</p> <p>4.1.1 Meningkatkan iklim investasi yang kondusif</p> <p>4.1.2 Meningkatkan pemanfaatan sumber potensi daerah secara terpadu</p>	<p>3.2.5.1. Meningkatkan produk dan nilai tambah industri kecil dan menengah</p> <p>4.1.1.1 Debirokratisasi regulasi: perijinan investasi</p> <p>4.1.2.1 Optimalisasi pengelolaan potensi daerah secara terpadu</p>	<p>3.2.4.1.2 Pengembangan dan pengelolaan produk wisata</p> <p>3.2.5.1.1 Pentinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah</p> <p>3-2.5.1.2 Pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri</p> <p>4.1.1.11 Pengembangan penanaman modal</p> <p>4.1.2.1.1 Pembinaan dan pengembangan pertambangan</p> <p>4.1.2.1.2 Pengembangan Otonomi Daerah</p>	<p>3.2.4.1.2.1. Peningkatan kualitas SDM pariwisata</p> <p>3.2.4.1.2.2. Pendataan dan pembinaan Kepariwisata</p> <p>3.2.5.1.1.1. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah</p> <p>3.2.5.1.2.1. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan luar Negeri</p> <p>3.2.5.1.2.2 Promosi dagang komoditi unggulan</p> <p>4.1.1.1.11 Pengembangan dan promosi penanaman modal</p> <p>4.1.1.1.1.2 Forum komunikasi dan lemu usaha penanaman modal</p> <p>4.1.1.1.1.3 Peningkatan pelaksanaan perijinan PUN PMDN</p> <p>4.1.2.1.1.1. Pengembangan kegiatan Pertambangan</p> <p>4.1.2.1.1.2. Pengendalian usaha Pertambangan</p> <p>4.1.2.1.2.1, Pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah</p>

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
		4.2. Mewujudkan masyarakat Bali sebagai satu kesatuan yang utuh tanpa menghilangkan jati diri	4.2.1 Meningkatnya kerjasama dan koordinasi pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah propinsi	4.2.1.1 Meningkatnya pola/bentuk kerjasama dan koordinasi antar pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah propinsi	4.1.2.1.3 Pembinaan dunia usaha 4.2.1.1.1 Pembangunan daerah bawahan 4.2.1.1.2 Pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat	4.1.2.1.22. Peningkatan kerjasama antar daerah dan internasional 4.1.2.1.3.1. Penyuluhan kepada wajib pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain 4.1.2.1.3.2. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (UED) 4.1.2.1.3.3. Penyertaan Modal Pemerintah 4.2.1.11.1. Koordinasi pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan antara pemerintah Propinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota 4.2.1.1.1.2. Oukungan perkuatan pembangunan Kabupaten/Kota 4.2.1.1.2.1 Pengembangan kawasan terpadu. 4.2.1.1.2.2 Pemberdayaan masyarakat miskin 5.1.1.1.1.1. Pembekalan teknis dan pengadaan peralalatan aparat tramtib. 5.1.1.1.1.2. Forum komunikasi dan konsultasi komponen masyarakat.
	5. Mewujudkan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka ketahanan sosial budaya yang dinamis dan kondusif	5.1 Meningkatkan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat	5.1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat keamanan dan ketertiban *	5.1.1.1 Meningkatkan profesionalisme dan jumlah aparat keamanan dan ketertiban	5.1.1.1.1. Pengembangan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.	

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
		5.2. Memperkuat ke- lahan sosial po- iilik dan budaya	5.2.1 Meningkatnya ke- sadaran masya- rakal untuk men- jaga keamanan dan ketertiban sei- ta kesadaran po- litik.	5.2.1.1 Meningkalkan sis- tern komunikasi po- litik, pengamanan desa adat dan sis- tern keamanan ling- kungan	5.2.1.1.1 Pembinaan kekuat- an rakyat 5.2.1.1.2 Belanegara 5.2.1.1.3 Pembinaan Poiitik 5.2.1.1.4. Pengembangan Operasional Pene- rangan	5.1.1.1.13. Pemberdayaan masya- rakat terhadap demo- krasi Pancasila dan organisasi kemasya- rakalan. 5.1.1.1.1.4. Pemberdayaan kelin- masan 5.2.1.1.1.1 Peningkatan kewas- padaan terhadap pe- nanggulangan bencana 5.2.1.1.1.2. Peningkatan kewas- padaan masyarakai terhadap slabilitas po- litik dan kamlibmas. 5.2.1.1.1.13 Pengembangan jari- ngan Eistem irifcmas: dan komunikasi di bi- dang deleksi dim. 5.2.1.1.2.1 Pendkiikan dan latihan bela negara 5.2.1.1.31 Pemberdayaan Organ- isasi Kemasyarakatan 5.2.1.1.4.1 Peningkalan Opeiiasi- onal Penerangan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
	6. Memberdayakan kebudayaan daerah, lembaga-lembaga tradisional dan lembaga adat daerah Bali dalam konteks kebudayaan nasional dan global	6.1 Menumbuh kembangkan kebudayaan daerah dan lembaga-lembaga adat/tradisional	6.1.1 Meningkatnya peranan kebudayaan daerah dan peranan lembaga-lembaga adat	6.1.1.1 Mengembangkan kebudayaan daerah sesuai dengan jati dirinya 6.1.1.2. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga tradisional, lembaga adat, peninggalan sejarah dan permuseuman	6.1.1.1.1 Pembinaan kesenian 6.1.1.1.2. Pembinaan kebhasaan, kesusasteraan dan kepusatakaan. 6.1.1.2.1 Pembinaan tradisi, peninggalan sejarah dan permuseuman	6.1.1.1.1.1 Persiapan dan penyelenggaraan pesta seni 6.1.1.1.1.2 -Pengembangan seni budaya 6.1.1.1.1.3 Pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional 6.1.1.1.1.4 Pengembangan hak paten kesenian 6.1.1.1.1.5 Penghargaan seni Dharma Kusuma 6.1.1.1.2.1 Pemberdayaan bahasa, aksara, dan sastra Bali. 6.1.1.1.2.2 Pembinaan, pelestarian pengembangan perpustakaan. 6.1.1.1.2.3 Pengembangan dokumentasi budaya Bali. 6.1.1.1.2.4 Penyalinan, alih aksara dan alih bahasanaskah lontar 6.1.1.1.2.5 Revitalisasi sastra Bali modern. 6.1.1.2.1.1. Pemantapan lembaga adat. 6.1.1.2.1.2. Pemberdayaan permuseuman. ¹ 6.1.1.2.1.3 Peningkatan peran desa Pekraman, subak dan sekaa-sekaa.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
		6.2. Melestarikan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat	6.2.1 Leslarnya budaya, adat dan agama serta nilai-nilai yang ada di masyarakat	6.2.1.1 Meningkatkan pe- nghayalan terhadap nilai-nilai budaya, adat, dan agama serta nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam rangka mem- oerkuat kebudayaan nasional.	6.2.1.1.1 Pelestarian dan pe- ngembangan kebu- dayaan	6.1.1.2.1.4 Pemantapan peranan lembaga-lembaga semi formal. 6.1.1.2.1.5 Revitalisasi sektor-sektor tradisional. 6.2.1.1.1.1 Peningkatan peles- tarian dan pengem- bangan kebudayaan 6.2.1.1.1.2 Pemeliharaan dan pe- lestarian benda ber- sejarah 6.2.1.1.1.3 Sosialisasi dan penda- taman nilai-nilai dasar kebudayaan Bali. 6.2.1.1.1.4 Pelestarian nilai-nilai budaya dan tradisi 6.2.1.1.1.5 Penghargaan kepada budayawan 6.2.1.1.1.6 Peningkatan kualitas subyek pendukung kebudayaan Bali 6.2.1.1.1.7 Pengembangan infer- masi kebudayaan 6.2.1.1.1.8 Peningkatan ketahan- an sistem religi, ba- hasa, kesenian orga- nisasi sosial, sistem peralatan dan mala pencaharian masyarakat Bali.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
	<p>7. Mewujudkan Dini: Sebagai Kesatuan yang utuh melalui pemerataan pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>-</p>	<p>7.1 Meningkatkan kesadaran dan persamaan persepsi serta komitmen tentang/potensi pengelolaan lingkungan dalam rangka mencapai kelestarian fungsi, daya dukung dan daya lampung lingkungan</p>	<p>7.1.1 Berkurangnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagai akibat suatu kegiatan.</p>	<p>7.1.1.1 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>7.1.1.2 Meningkatkan pengelolaan lingkungan alam yang meliputi ekosistem daratan, pesisir dan laut serta atmosfer.</p>	<p>6.2.1.1.2 Peningkatan sarana kehidupan beragama</p> <p>6.2.1.1.3 Penerangan, bimbingan dan kefukunan hidup beragama</p> <p>7.1.1.1.1 Pengendalian pencemaran dan rehabilitasi kerusakan lingkungan</p> <p>7.1.1.2.1 Peningkatan efektifitas pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam</p>	<p>6.2.1.1.2.1 Peningkatan sarana dan prasarana kehidupan beragama.</p> <p>6.2.1.1.2.2 Peningkatan efektifitas lembaga keagamaan.</p> <p>6.2.1.1.3.1 Bimbingan dan penyuluhan kehidupan beragama.</p> <p>6.2.1.1.3.2 Peningkatan kerukunan umat beragama.</p> <p>7.1.1.1.1.1. Penpawasan Teknis Pemakaian air bawah tanah / air permukaan</p> <p>7.1.1.1.1.2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.</p> <p>7.1.1.1.1.3. Pemantauan dan pemulihan lingkungan.</p> <p>7.1.1.1.1.4. Pengendalian kerusakan lingkungan usaha pertambangan.</p> <p>7.1.1.2.1.1. Pembualan sumur resapan dan sumur pantau</p> <p>7.1.1.2.1.2. Penataan dan rehabilitasi hutan</p> <p>7.1.1.2.1.3. Pengelolaan daerah aliran sungai.</p> <p>7.1.1.2.1.4. Peningkatan perlindungan hutan.</p>

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
						<p>7.1.1.2.15 Konservasi sumber daya alam hayati.</p> <p>7.1.1.2.2. Pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir dan laul</p> <p>7.1.1.2.2.1 Pengendalian reklamasi lahan sungai dan pantai</p> <p>7.1.1.2.2.2 Pengamanan Daerah Pantai</p> <p>7.1.1.2.2.3 Pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu</p> <p>7.1.1.3.1 Penataan kelembagaan dan penegakan hukum dalam pelestarian lingkungan hidup</p> <p>7.1.1.3.1.1 Perkuatan Kelembagaan pengelolaan lingkungan</p> <p>7.1.1.3.1.2 Penegakan hukum lingkungan</p> <p>7.1.1.3.1.3 Pembinaan dan penyuluhan hukum lingkungan</p> <p>7.1.2.1.1. Pengembangan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>7.1.2.1.1.1. Pengembangan sistem informasi lingkungan.</p> <p>7.1.2.1.1.2. Penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>7.1.2.1.1.3. Pemetaan masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>7.1.2.2.1. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</p> <p>7.1.2.2.1.1. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan</p>
			7.1.1.3 Meningkatkan pengawasan, penindakan dan penegakan hukum	7.1.1.3 Mewujudkan kesamaan persepsi dan sikap semua pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup		
			7.1.2, Meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.	7.1.2.1 Mewujudkan kesamaan persepsi dan sikap semua pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup		
				7.1.2.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
		7.2. Menumbuh kembangkan daerah yang belum berkembang	7.2.1 Meningkatnya pengembangan wilayah secara berimbang dan terpadu	7.2.1.1.Mengembangkan daerah potensial dengan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai	7.2.1.1.1. Pengusahaan sumber-sumber air dan penyediaan air baku 7.2.1.1.2 Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. 7.2.1.1.3. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.	7.1.2.2.1.2. Peningkatan peran sekokoh dan peiguruan unyxi udidni peng6to- 7.1.2.2.1.3. Peningkatan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan 7.2.1.1.1.1 Peencanaan teknis sumber-sumbetair 7.2.1.1.1.2. Operasi dan pemeliharaan, pengamanan danau, waduk dan sumber air 7.2.1.1.2.1. O&P.Pembinaan dan pengawasan jaringan irigasi 7.2.1.1.2.2. Pertaikan dan peningkatan jaringan irigasi 7.2.1.1.2.3. O & P , janggan irigasi lintas kabupaten/kota dan penanggulangan bencana alam. 7.2.1.1.3.1 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan berkala 7.2.1.1.3.2 Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan jembatan rutin.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
					7.2.1.1.4 Peningkatan jalan dan penggantian jembatan.	7.2.1.1.4.1 Peningkatan jalan 7.2.1.1.4.2 Penggantian jembatan. 7.2.1.1.4.3 Perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan
					7.2.1.15 Pembangunan transportasi jalan	7.2.1.1.5.1 Pembangunan Jalan 7.2.1.1.5.2 Pembangunan Jembatan
					7.2.1.1.6 Perbaikan perumahan permukiman.	7.2.1.1.6.1 Penataan lingkungan permukiman 7.2.1.1.6.2 Pembangunan drainase 7.2.1.1.6.3 Penanganan persampahan 7.2.1.1.6.4 Penangananairlimbah 7.2.1.1.6.5 Penanganan Air Bersih
					7.2.1.1.7 Pengembangan perumahan	7.2.1.1.7.1 Perbaikan kawasan kumuh 7.2.1.1.7.2 Perbaikan lingkungan perumahan dan permukiman
					7.2.1.1.8 Penataan bangunan	7.2.1.1.8.1 Pelestarian/Penataan Desa Tradisional 7.2.1.1.8.2 Penataan Bangunan dan Lingkungan
					7.2.1.1.9 Restrukturisasi bidang Energi	7.2.1.1.9.1 Pengembangan Tenaga Listrik Alternatif

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
				7.2.1.2. Meningkatkan sistem pelayanan jasa perhubungan, meteorologi dan geofisika yang tiandal dan terpadu	7.2.1.2.1 Pengembangan aksesibilitas	7.2.1.2.1.1. Pengawasan dan pengendalian pelayanan jasa dan asosiasi/perusahaan jasa transportasi darat, laut, udara, pos dan telekomunikasi 7.2.1.2.1.2. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
		7.3. Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan	7.3.1. Terwujudnya pembangunan sesuai dengan tata ruang	7.3.1.1. Mengembangkan pembangunan sesuai peiutukannya	7.2.1.2.2. Pengembangan Keselamatan Lalu lintas Jalan	7.2.1.2.2.1. Pemeliharaan/Pengadaan dan Fasilitas keselamatan lalu lintas jalan propinsi
					7.3.1.1.1. Penataan ruang	7.3.1.1.1.1. Perencanaan tata ruang 7.3.1.1.1.2. Pengendalian pemanfaatan ruang
					7.3.1.1.2. Pengelolaan perlanahan.	7.3.1.1.2.1. Penataan administrasi pertanahan 7.3.1.1.2.2. Penataan Tata guna tanah
	8. Menerapkan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan yang efektif, efisien, dan transparan serta meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah	8.1. Meningkatkan sistem administrasi publik yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, responsif dan akuntabel.	8.1.1. Meningkatkan disiplin kerja, sistem dan prosedur kerja yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.	8.1.1.1. Meningkatkan disiplin aparatur pemerintah dengan pengawasan melekat	8.1.1.1.1. Pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan.	8.1.1.1.1.1. Pendayagunaan sistem dan pelaksanaan Pengawasan 8.1.1.1.1.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
	untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)			81.1.2 Meningkatkan sistem dan prosedur kerja aparat pemerintah.	8.1.1.2.1 Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	8.1.1.1.1.3. Bitnтек manajemen Harga Perhitungan Setidiri/owner estimate (BTMOE) 8.1.1.1.1.4. Penyusunan standar-disasi harga barang/jasa 8.1.11.1.5. Peningkatan penge-lolaan barang daeiah 8.1.1.2.1.1 Penalaan dan Pen-dayagunaan Organi-sasi petangkai daerah. 8.1.1.2.1.2 Penalaan sislem ke-tatalaksanaan. 8.1.1.2.1.3. Peningkalan efisiensi dan etektilitas kerja pegawai 8.1.1.2.1.4. Penyusunan UAKIP Propinsi Bali
				81.1.3 Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparalur pemerintah	8.1.1.3.1 Penyemputnaan prasarana fisik pemerintah 8.1.1.3.2 Pengadaan perlengkapan dan peraiatan	8.1.1.3.1.1 Peningkalan prasarana fsikkantor pemerintah 8.1.1.3.1.2 Rehab prasarana fisik kanlor pemerinlah 8.1.1.3.2.1 Pengadaan perlengkapan dan peraiatan kantor pemerinlai 8.1.1.3.2.2 Inventarisasi aset aset daerah. 81.1.3.2.3 Peningkalan penataan dan pemanfaatan aset daerah.

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	KEBIJAKSANAAN	PROGRAM	KEGIATAN
		8.2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah	8.2.1. Meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan aparatur	8.2.11 Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah	8.2.1.1.1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah	8.2.1.1.1.1. Analisis jabatan. 8.2.1.1.1.2. Analisis kebutuhan diklat 8.2.1.1.1.3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan, kepemimpinan, tenaga teknis dan fungsional. 8.2.1.1.1.4. Peningkatan pendidikan kader aparatur 8.2.1.1.1.5. Bimtek pemahaman peraturan kepegawaian 8.2.1.1.1.6. Penataan administrasi kepegawaian
			8.2.2. Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah.	8.2.2.1 Meningkatkan prinsip-prinsip manajemen dan akuntabilitas aparatur pemerintah	8.2.2.1.1 Peningkatan kualitas pelayanan publik	8.2.1.1.2.1. Meningkatkan kesejahteraan pegawai 8.2.1.1.2.2. Peningkatan pemeliharaan kesehatan pegawai dan pensiunan 8.2.2.1.1. Pengembangan standar pelayanan 8.2.2.1.1.2. Peningkatan operasional penerangan, penyebarluasan informasi pembangunan 8.2.2.1.1.3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pembangunan daerah. 8.2.2.1.1.4. Penataan arsip daerah